

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001, pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Otonomi daerah merupakan langkah maju untuk menjadikan pemerintah daerah lebih mandiri, daripada selalu mengandalkan pemerintah pusat. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah dapat mengatur keuangan dan pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa desentralisasi adalah penyerahan kewenangan kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam kesatuan sistem negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjadi landasan utama penyelenggaraan otonomi daerah.

Era globalisasi menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik sehingga menjadi dasar perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara yang demokratis. Karakteristik pelaksanaan *good governance* menurut UNDP (1997) meliputi *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability*, dan *strategic vision*. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, artinya harus dicapai kontak dengan setiap orang. Mardiasmo (2002) menunjukkan bahwa pemerintah dapat memainkan tiga peran dalam membentuk *good governance*, yaitu membangun transparansi, akuntabilitas publik dan *value for money* (ekonomi, efisiensi dan

efektivitas). Penerapan tata kelola yang baik menurut konsep *good governance* mengutamakan prinsip transparansi yang dapat ditafsirkan.

Transparansi adalah masalah pemerintah Indonesia. Pemerintah semakin dituntut untuk meningkatkan transparansi pengungkapan dan penyajian informasi anggaran dan keuangan. Dalam memantau pengelolaan urusan pemerintahan, transparansi sangat dibutuhkan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan sumber daya. Kepedulian terhadap transparansi dapat ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Republik Indonesia (No. 14 tahun 2008) yang menetapkan bahwa pejabat publik di semua tingkatan lebih transparan, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan informasi dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh publik.

Pengelolaan keuangan nasional merupakan kegiatan yang berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Rahmawati & Mahmud, 2016). Perubahan lingkungan eksternal terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memungkinkan mereka memiliki pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan transparan dalam mengelola keuangan daerah. Penanggung jawab daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD, dan memberitahukan kepada masyarakat tentang pelaksanaan laporan tersebut oleh pemerintah daerah.

Teori keagenan menjelaskan bahwa asimetri informasi disebabkan oleh perbedaan informasi antara pemerintah (*agent*) dan masyarakat (*principal*), masyarakat mendelegasikan tugas-tugas pemerintah daerah kepada pemerintah untuk kegiatan pemerintahan. Pemerintah mempunyai lebih banyak informasi mengenai tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, oleh karena itu wajib melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Pekerjaan khusus sistem akuntabilitas keuangan pemerintah adalah mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan menyediakan informasi keuangan daerah.

Swadayamandiri (2008) mengemukakan bahwa untuk menjadikan sistem keuangan pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel, ada enam aspek yang perlu diperhatikan, yang merupakan prasyarat utama untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keenam bidang tersebut adalah sistem pembukuan yang perlu ditingkatkan secara fundamental agar sesuai dengan sistem yang diterapkan oleh Menteri Keuangan, guna memastikan sinkronisasi dan integrasi data keuangan, daftar aset dan utang, jadwal penyusunan laporan keuangan, dan laporan keuangan. Sistem audit dan akuntabilitas anggaran, penjaminan mutu pengawas internal dan sumber daya manusia LKPD yaitu menentukan status fungsional bendahara, pengetahuan dasar akuntansi untuk bendahara atau pemegang buku, dan penggunaan tenaga BPKP atau pelatihan akuntansi keuangan daerah.

Pemilukada merupakan salah satu bentuk persaingan politik di masyarakat. Persaingan politik adalah persaingan untuk mendapatkan kekuasaan untuk

mengontrol pemerintah dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk keuntungan politik dan sosial. Peran partai politik dalam pemilu/pasca-konflik sangat penting karena memiliki hak untuk mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bukan calon perseorangan. Pernyataan tersebut menginformasikan kepada parpol bahwa mereka pernah mengikuti kompetisi politik antar pimpinan daerah. Dewi dan Aziz (2016) mengemukakan bahwa partai yang memiliki kesempatan untuk menunjuk kepala daerah dan wakilnya diduga melakukan pilkada pasca-konflik sebagai peluang untuk mencari uang.

Sumber daya manusia yang baik merupakan salah satu faktor dalam melaksanakan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik membutuhkan komunitas yang berkembang dengan baik. Hasil pengujian yang dilakukan oleh Setyowati (2016) menunjukkan bahwa pembangunan manusia berdampak positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat pembangunan masyarakat maka keinginan masyarakat yang ingin dicapai akan semakin beragam, yang pada akhirnya akan menimbulkan lebih banyak tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintah. Keterbukaan informasi keuangan daerah menjadi salah satu syarat bagi masyarakat untuk memahami status keuangan dan hasil pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian peristiwa tersebut menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Pemerintah menggunakan hutang untuk mendanai kegiatan masyarakat. Utang daerah dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah

lainnya, lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan nonbank dan masyarakat. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan jumlah aset yang dimilikinya untuk menjamin dana pinjaman. *Rasio leverage* menunjukkan sejauh mana dana pinjaman digunakan untuk mendanai aset milik pemerintah daerah (Sinaga, 2011). Semakin rendah tingkat *leverage* maka semakin kuat kemampuan entitas untuk membiayai biaya operasional melalui dana internal. Semakin besar *leverage* maka semakin kuat pula kemampuan entitas untuk membiayai sendiri biaya operasionalnya karena adanya kebutuhan dana eksternal (Diani, 2016). Berdasarkan teori keagenan, besarnya hutang organisasi menjadi keputusan manajemen organisasi untuk transparansi keuangan daerah.

Penelitian mengenai ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia. (Hanifah, 2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kompetisi Politik, Indeks Pembangunan Manusia, dan *Leverage* terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada model penelitian I indeks pembangunan manusia dan *leverage* berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah, sedangkan kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Hasil model penelitian II adalah indeks pembangunan manusia dan *leverage* berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah, sedangkan kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Wau (2015) yang meneliti tentang pengaruh analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan 2 model. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pengujian model I pendapatan per kapita dan opini audit memiliki pengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah, sedangkan kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, dan rasio kemandirian finansial tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IFR pada *website* pemerintah daerah. Pada pengujian model 2 menunjukkan bahwa rasio kemandirian finansial memiliki pengaruh terhadap keteraksesan IFR pada website pemerintah daerah, sedangkan kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap keteraksesan IFR pada website pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Putra & Syofyan, 2020) Hasil penelitian menemukan variabel ukuran pemerintahan, pendapatan per kapita dan *leverage* yang tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas laporan keuangan internet oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Studi lanjutan yang dilakukan oleh (Nosihana & Yaya, 2016) memperoleh hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Menurut penelitian yang telah selesai, persaingan politik akan berdampak pada rilis laporan keuangan melalui Internet. Besar kecilnya pemerintahan daerah (pemerintah daerah) juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap rilis laporan keuangan. Rasio pembiayaan hutang (*leverage*), aset pemerintah daerah, jenis pemerintah daerah dan opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan

keuangan Internet. Studi sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah pada situs resmi pemerintah daerah tidak konsisten, hal ini semakin memperparah perdebatan di kalangan praktisi, oleh karena itu penelitian tentang transparansi informasi keuangan daerah menjadi sangat penting.

Penelitian ini mengutip penelitian yang dilakukan oleh (Wau, 2015) di Jawa dan (Laswad et al., 2005) di Selandia Baru. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu kompetisi politik dan *leverage*. Variabel kompetisi politik dan *leverage* dipilih karena hasil penelitian sebelumnya masih berbeda. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel bebas baru yaitu indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dianggap sebagai variabel yang dapat mendukung terwujudnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang berkaitan dengan kajian empirik/fakta dan adanya perbedaaan hasil penilitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul “Pengaruh Kompetisi Politik, Indeks Pembangunan Manusia, Dan *Leverage* Terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah se-Luwu raya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kompetisi politik berpengaruh terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah se-Luwu raya?
2. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah se-Luwu raya?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah se-Luwu raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetisi politik berpengaruh terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah se-Luwu raya.
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah se-Luwu raya
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* berpengaruh terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah se-Luwu raya
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetisi politik, indeks pembangunan manusia dan *leverage* berpengaruh terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah se-Luwu raya

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan sebagai alat ukur kemampuan yang didapat dari bangku perkuliahan. Penelitian ini juga memberi manfaat untuk mengetahui pengaruh kompetisi politik, indeks pembangunan manusia dan *leverage* terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu bentuk pengaplikasian atau penerapan dari berbagai teori yang ada, serta penegasan terhadap beberapa hasil penelitian yang telah ada.

2. Bagi Peneliti Lain

Sebagai tambahan rujukan atau referensi yang nantinya dapat dipertimbangkan dalam penelitian yang berhubungan atau sama dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.

3. Bagi Akademis

Sebagai acuan atau literatur yang dapat dipertimbangkan dalam bidang akuntansi keuangan daerah, terkhusus tentang kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah peneliti hanya berfokus pada pengaruh kompetisi politik, indeks pembangunan manusia dan *leverage* terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah Se-Luwu raya.

Pembahasan mengenai batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah pada pokok permasalahan yang dibahas peneliti, oleh karena itu diharapkan penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang ditetapkan. Peneliti membatasi penelitian ini pada :

- a) Penelitian ini hanya dilakukan pada Pemerintah Daerah se-Luwu Raya
- b) Penelitian ini hanya membahas berkaitan dengan pengaruh kompetisi politik, indeks pembangunan manusia, *leverage* terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah se-Luwu Raya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*).

Teori keagenan adalah sejenis hubungan keagenan, ini adalah semacam kontrak, dimana satu atau lebih (prinsipal) mendelegasikan kekuatan pengambilan keputusan tertentu kepada agen untuk mempekerjakan orang lain (agen) untuk menyediakan banyak layanan untuk kepentingan mereka sendiri (Jensen & Meckling, 1976). Benturan kepentingan akan muncul dari pendelegasian tugas yang dipercayakan kepada agent, dimana kepentingan agent bukan untuk memaksimalkan kesejahteraan principal, tetapi cenderung mengorbankan kepentingan owner dengan cara yang egois.

Organisasi sektor publik pada dasarnya didasarkan pada teori keagenan. Terlepas dari diterima atau tidaknya, ada hubungan dan masalah keagenan dalam pemerintahan (Halim & Abdullah, 2006). Mardiasmo menjelaskan bahwa dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai task leader yaitu memberikan akuntabilitas kepada seluruh wali amanat (masyarakat), menyatakan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh wali amanatnya. Tanggung jawab Kegiatan dan kegiatan. Hak untuk menuntut akuntabilitas. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah daerah berperan sebagai agen yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam hal ini sebagai *principal*. Sebagai *Principal*, masyarakat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Sebagai agen, pemerintah daerah

berkewajiban melaporkan kepada masyarakat hasil pelaksanaan penerimaan dan penggunaan sumber daya berupa laporan keuangan oleh pemerintah.

Hubungan keagenan akan menimbulkan masalah keagenan berupa asimetri informasi. Asimetri informasi adalah perbedaan kepentingan informasi antara agen dan prinsipal. Pemerintah memiliki lebih banyak informasi daripada publik. Pemerintah cenderung mengedepankan kepentingan pribadi tanpa persetujuan publik, sehingga informasi yang diterima publik terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak dapat memantau semua kegiatan, tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Menurut penelitian (Wau, 2015), masalah asimetri informasi akan menimbulkan biaya keagenan, yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan kepada publik. Biaya agensi adalah biaya yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah komunitas. Jensen & Meckling (1976) mengelompokkan tiga jenis biaya keagenan, yaitu: yang pertama *monitoring costs* merupakan biaya pengawasan yang dilakukan oleh principal untuk memonitoring kegiatan agent (the monitoring expenditures by the principal), kedua *bonding costs* merupakan biaya jaminan yang dikeluarkan oleh agen untuk membentuk mekanisme jaminan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (the bonding expenditure by the agent) dan yang ketiga *residual costs* merupakan kerugian residual yang berkaitan dengan biaya untuk mendorong agen agar bertindak sesuai dengan kemampuannya untuk kepentingan prinsipal.

2.1.1 Kompetisi Politik

Salah satu perubahan mendasar pasca reformasi adalah persaingan politik yang semakin ketat di Indonesia. Bardhan dan Yang (2004) dalam Nairobi & Jaya (2014) menjelaskan bahwa persaingan politik adalah persaingan memperebutkan kekuasaan untuk mengontrol pemerintah dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan politik dan sosial. Downs (1957) dari (Nairobi & Jaya, 2014) mendefinisikan persaingan politik sebagai persaingan antar kandidat, yaitu mereka mendapatkan suara terbanyak dari pemilih untuk menjalankan platform kebijakan yang layak.

Persaingan politik yang tinggi akan meningkatkan biaya, menyebabkan kepala daerah terpilih sering mengabaikan janji pilkada pasca konflik. Pencalonan kepala daerah tidak lepas dari parpol pendukungnya. Zaman (2016) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi politik yang didirikan secara sukarela oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia. Cita-cita dan keinginannya yang sama adalah memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, negara dan negara secara universal. pemilu. Gatara (2008) mengemukakan bahwa setiap definisi partai politik akan berkaitan dengan kekuasaan (jabatan publik atau politik) yang merupakan tujuan keseluruhan dari setiap partai politik dalam menjalankan aktivitasnya. Posisi partai politik dalam pemilihan kepala daerah memiliki arti strategis. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang mengatur bahwa semua calon yang berhak maju ke kompetisi harus dicalonkan oleh partai politik tertentu. Caleg utama daerah yang berhak

dipromosikan harus melalui partai politik atau aliansi parpol yang menguasai 15% kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau memberikan suara pada pemilihan legislatif.

Zaman (2016) menunjukkan bahwa sebagai organisasi yang mengutarakan kepentingan rakyat, partai politik biasanya dikaitkan dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Pembentukan partai politik mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mencalonkan calon pejabat publik termasuk kepala daerah. Bentuk nyata kader produksi partai adalah mengikuti pemilihan kepala daerah. Parpol itu sendiri atau anggotanya yang mengajukan calon kepala daerah juga ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Pilkada merupakan arena dimana partai politik bersaing dengan partai lain untuk memperebutkan kekuasaan lokal.

Teori keagenan menjelaskan bahwa persaingan politik berkaitan dengan motivasi dan kebijakan pemerintah daerah. Sebagian besar informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan informasi yang dimiliki oleh kepala daerah. Persaingan politik yang ketat menuntut para pemimpin dan pejabat daerah untuk lebih transparan tentang informasi yang mereka miliki. Tujuan tuntutan agar para pemimpin daerah tidak hanya menyadari kepentingannya dan partai politik yang mereka dukung. Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diawasi oleh masyarakat, tetapi juga oleh lawan dari Bupati dan Parpol yang tidak memilih Bupati pada Pilkada pasca-konflik. Teori kelembagaan juga menjelaskan adanya asimetri informasi, sehingga masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Semakin ketatnya persaingan politik

diharapkan pemerintah daerah juga dapat meningkatkan perwujudan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Persaingan politik atau disebut juga persaingan politik terlihat dari persaingan antar partai politik, mereka bisa mendapatkan jumlah pemilih dalam pemilu. Persaingan politik menggambarkan derajat persaingan politik antara pemimpin daerah saat ini dengan lawan politiknya (Diani, 2016). Rahim dan Martani (2010) mengemukakan bahwa persaingan politik diwujudkan dalam derajat persaingan memperebutkan jabatan kepala daerah. Semakin banyak lawan yang mengikuti pilkada, persaingan politik semakin ketat. Persaingan politik yang tinggi adalah bentuk pengawasan atas pemerintah yang dipilih secara demokratis. Akibat pengawasan lawan politik, pemerintah daerah dengan persaingan politik yang ketat semakin termotivasi untuk melaporkan informasi tentang pelaksanaan pemerintahan.

Kesimpulannya adalah Kompetisi politik yang besar akan menghasilkan pengawasan yang semakin besar pula dan Pemda (khususnya kepala daerah) sebagai pihak yang diawasi akan menanggung *monitoring cost* yang besar pula.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme atau UNDP (1990) menunjukkan bahwa pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan manusia (*"a process of enlarging peoples's choices"*), yang menekankan pada kebebasan untuk sehat (health), terdidik (educated), dan mendapatkan standar hidup yang lebih baik. Ini dapat didefinisikan sebagai berikut: Aset berharga suatu negara adalah sumber daya manusia.

Menurut laporan UNDP (1995), prinsip-prinsip dasar dari konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek yaitu: pembangunan harus fokus pada populasi, pembangunan berarti menambah pilihan yang dimiliki penduduk, tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka. Konsep pembangunan manusia harus berpusat pada kependudukan, bukan hanya aspek ekonomi, pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia, tetapi juga pada penggunaan terbaik dari kemampuan manusia tersebut, pembangunan manusia memiliki empat pilar utama, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan dan pembangunan manusia adalah dasar untuk menentukan tujuan pembangunan dan menganalisis pilihan untuk mencapai tujuan tersebut.

Tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk menyejahterakan rakyat. Umat manusia bukan hanya obyek pembangunan, tetapi juga obyek yang dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan suatu bidang tertentu, dan bidang-bidang tersebut menjadi kemajuan suatu negara di tingkat makro (Widarwanto, 2014). UNDP yang mengusulkan dan mendukung konsep pembangunan manusia, mengembangkan indikator yang secara deskriptif dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990. Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia ditinjau dari aspek kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) dan non fisik (intelektual) (Saputra, 2011). Pembangunan yang mempengaruhi kondisi fisik masyarakat tercermin dari angka

harapan hidup dan daya beli masyarakat, sedangkan dampak non fisik tercermin pada kualitas pendidikan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat dampak upaya dan kinerja pembangunan daerah. Indikator ini mempunyai arti yang sangat luas karena menunjukkan kualitas penduduk di daerah dengan harapan hidup, pengetahuan dan standar yang layak. hidup. (Saputra, 2011). Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk memperoleh hasil pembangunan dari segi pendapatan, kesehatan, pendidikan, dll (BPS 2015).

Sumber daya manusia yang berkualitas membuat masyarakat semakin sadar akan kebutuhan informasi keuangan daerah. Masyarakat juga tahu perannya dalam memantau kegiatan pemerintah daerah. Menurut teori kelembagaan, sumber daya manusia yang baik akan membutuhkan pengetahuan tentang informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah merupakan sarana untuk menyasar masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya. Personel yang berkualifikasi akan menerima informasi keuangan daerah dengan baik, sehingga mengurangi asimetri informasi.

Indeks pembangunan manusia yang ditetapkan dengan metode tiga dimensi dasar mudah dihitung dalam pengoperasiannya, sehingga diperoleh indeks yang mencerminkan upaya pembangunan manusia. Todara (2003) menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut meliputi umur panjang, pengetahuan dan standar hidup.

2.1.3 *Leverage*

Jika pemerintah membelanjakan lebih dari penggalangan dana, pemerintah akan meminjam dari swasta untuk menutupi defisit anggaran (Mankiew 2009: 420). Akumulasi pinjaman ini dikaitkan dengan hutang pemerintah. Rasio *leverage* menunjukkan sejauh mana rasio tersebut menggambarkan rasio jumlah hutang pihak luar terhadap dananya sendiri (Medina, 2012). Minarsih (2015) mengemukakan bahwa *leverage* terkait dengan penggunaan aset atau dana, dan pemerintah daerah harus menanggung biaya tetap atau biaya tetap. Besarnya hutang organisasi berdasarkan teori keagenan merupakan pendorong bagi manajemen organisasi untuk mengungkapkan laporan keuangan yang lebih baik (Ratmono, 2013).

Tingkat pembiayaan utang (*leverage*) berdasarkan teori kelembagaan digunakan sebagai pertimbangan pemerintah daerah dalam memberikan informasi tersebut kepada pihak terkait. Memberikan informasi tentang *leverage* dapat mengurangi asimetri informasi. Hal itu dilakukan untuk membuktikan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi utangnya. Kontrak perjanjian utang mengharuskan pemerintah memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada kreditor tentang kinerja keuangan mereka. Laswad et al. (2005) percaya bahwa menggunakan hutang untuk mengumpulkan dana untuk pelayanan publik akan memungkinkan para manajer politik (pemimpin daerah) untuk mencoba mengurangi biaya hutang. Menurut Ratmono (2013), besarnya hutang dapat menyebabkan organisasi menerapkan *mandatory isomorphism* untuk mengatasi

tekanan kreditor. Isomorfisma wajib dapat berbentuk konvensi pelaporan keuangan, yang lebih mudah diperoleh kreditor.

Rasio hutang atau *leverage* sangat penting bagi kreditor ketika mengambil keputusan kredit kepada pemerintah daerah. Kreditor menggunakan rasio ini untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi utangnya. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah terlilit utang atau harus mencari cara untuk mengurangi utang (Sesotyaningtyas, 2012).

Hutang yang digunakan untuk mendanai kegiatan masyarakat memberikan insentif bagi para pemimpin daerah untuk mengurangi biaya hutang (Zimmerman & Wieder, 1977), Laswad et al., 2005). Hal ini dapat dicapai dengan pengungkapan informasi secara sukarela yang akan membantu kreditor untuk memantau. Pengungkapan tambahan dapat dilakukan dalam bentuk kertas tradisional dari laporan keuangan dan media lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan kewajiban sebagai hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian peristiwa tersebut menyebabkan keluarnya sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah aset bersih pemerintah, dan merupakan perbedaan antara aset dan kewajiban. Utang daerah atau pinjaman daerah bisa berasal dari: pemerintah pusat dimana berasal dari APBN termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri dan/atau penerusan pinjaman luar negeri, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga keuangan bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang

berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

(Minarsih, 2015) menunjukkan bahwa walaupun dengan *leverage* yang rendah, kinerja dimasa mendatang akan menurun karena adanya pembayaran hutang dan pembayaran bunga yang akan membebani pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Kompetisi Politik, Indeks Pembangunan Manusia, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia (Hanifah, 2017)	Variabel dependen: Ketersediaan dan keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia. Variabel Independen: 1. kompetisi politik 2. IPM 3. <i>Leverage</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada model penelitian I indeks pembangunan manusia dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah, sedangkan kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Hasil model penelitian II adalah indeks pembangunan manusia dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah, sedangkan kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah.
2	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah (Wau, 2015)	Variabel Dependen: Ketersediaan IFR dan Keteraksesan IFR Variabel Independen: 1. Kompetisi Politik 2. Ukuran Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menggunakan regresi logistik ordinal menemukan bahwa pendapatan per kapita masyarakat dan opini audit berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi

		3.Rasio Kemandirian Finansial 4. Pendapatan per Kapita 5. Opini Audit	keuangan pada website pemerintah. Hasil penelitian menggunakan regresi berganda menemukan bahwa rasio kemandirian finansial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap keteraksesan informasi keuangan pada website pemerintah.
3	Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita Dan <i>Leverage</i> Terhadap Keteraksesan Internet Financial Report Oleh Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat) (Putra & Syofyan, 2020)	Variabel dependen: Keteraksesan Internet Financial Report Oleh Pemerintah Daerah. Variabel Independen: 1.Ukuran pemerintah 2.pendapatan perkapita 3. <i>Leverage</i>	Hasil penelitian menemukan variabel ukuran pemerintahan, pendapatan per kapita dan <i>leverage</i> yang tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas laporan keuangan internet oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4	Pengaruh Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris : Pemerintah Daerah Di Pulau Sumatera Tahun 2018) (Suhartono & Jessica, 2020)	Variabel dependen: Pengungkapan Sukarela Variabel Independen: 1. Intergovernmental Revenue 2.Indeks Pembangunan Manusia 3. Kekayaan Daerah 4. Opini Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Opini Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Sukarela. Sedangkan Intergovernmental Revenue dan Kekayaan Daerah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela.
5	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia (Kurniawan et al., 2019)	Variabel dependen: Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia Variabel independen: 1. <i>leverage</i> 2. Opini audit	Hasil penelitian model penelitian I menunjukkan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap ketersediaan internet financial reporting oleh pemerintah daerah, sedangkan opini audit dan kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak

		3.Kemandirian keuangan Pemerintah Daerah	berpengaruh terhadap ketersediaan internet financial reporting oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian model penelitian II menunjukkan bahwa <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintah daerah, sedangkan opini audit dan kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintah daerah.
6	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah (Afriansyah, 2013)	Variabel dependen: Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Variabel independen: 1. ukuran 2. tingkat investasi 3. kekayaan daerah 4. kompetisi politik 5. <i>Press Visibility</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa press visibility secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan terdapat keengganan dari pejabat pemerintah daerah untuk memberikan informasi akuntansinya kepada media karena kecenderungan media yang lebih banyak memberitakan sisi negatif suatu pemerintah daerah seperti defisit anggaran dan korupsi. Sedangkan faktorfaktor lainnya, yaitu ukuran, tingkat investasi, kekayaan pemerintahan daerah dan kompetisi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah.
7	Analisis Faktor-Faktor	Variabel dependen:	Hasil penelitian ini

	Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah (Sinaga, 2011)	Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Variabel independen: 1. Kompetisi politik 2. Ukuran Pemerintahan Daerah 3. <i>Leverage</i> 4. Kekayaan Pemerintahan Daerah 5. Tipe Pemerintahan Kabupaten	menunjukkan bahwa tipe pemerintahan kabupaten secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pada pemerintahan kabupaten, sebagai daerah asal urbanisasi, terdapat lebih sedikit pengawasan akibat sedikitnya koalisi pemilih yang terbentuk, serta tingkat penggunaan dan akses internet yang juga lebih rendah. Sedangkan faktor-faktor lainnya, yaitu kompetisi politik, ukuran, <i>leverage</i> , dan kekayaan pemerintahan daerah, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.
8	<i>Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities.</i> (Laswad et al., 2005)	Variabel Dependen: Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah Variabel Independen: 1. Kompetisi Politik 2. Ukuran 3. <i>Leverage</i> 4. Kekayaan Pemerintahan Daerah 5. Visibilitas Pers 6. Tipe Council	<i>Leverage</i> , Kekayaan Pemerintah Daerah, Visibilitas Pers memiliki hubungan positif dengan praktik IFR. Tipe Council berhubungan negatif dengan IFR. Hubungan positif antara praktik IFR dengan kompetisi politik dan ukuran tidak didukung
9	<i>The Accessibility of Financial Reporting of U.S. Municipalities On The Internet.</i> (Styles & Tennyson, 2007)	Variabel Dependen: Model 1: Laporan keuangan tahunan komprehensif yang terdapat di internet Model 2: Nilai indeks aksesibilitas Variabel	Ukuran, kualitas laporan keuangan, dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap penyediaan laporan keuangan di situsnya. Aksesibilitas data keuangan di internet berhubungan dengan

		<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran 2. Struktur Pemerintahan 3. Kualitas Laporan Keuangan 4. Pendapatan per Kapita 5. Utang 6. Kondisi Keuangan 	ukuran, pendapatan per kapita penduduk, tingkat utang, dan kondisi keuangan.
10	<p>Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. (Ratmono, 2013)</p>	<p>Variabel Dependen: Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan IFR Pemerintah daerah</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Pemerintah daerah 2. Hutang Pemerintah daerah 3. Kekayaan Pemerintah daerah 4. Urbanisasi Pemerintah daerah 5. Ketergantungan Finansial 6. Jenis opini BPK 7. Belanja Pemerintah daerah 	<p>Tingkat ketersediaan APBD dalam website lebih tinggi daripada LKPD secara lengkap. Semakin besar ukuran, utang, kekayaan pemerintah daerah, tingkat urbanisasi, tingkat ketergantungan finansial pemerintah daerah, dan opini audit maka semakin rendah ketersediaan IFR. Semakin besar belanja pemerintah daerah maka semakin tinggi ketersediaan IFR. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, utang pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, tingkat urbanisasi, opini audit, dan belanja pemerintah daerah, maka semakin rendah keteraksesan IFR. Semakin tinggi tingkat ketergantungan finansial maka semakin tinggi keteraksesan IFR.</p>
11	<p>Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Kompetisi Politik, Opini Audit Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Aksesibilitas Internet Financial Reporting (IFR) Pada Pemerintah Daerah Di</p>	<p>Variabel Dependen: Aksesibilitas Internet Financial Reporting (IFR) Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia.</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan Pemerintah Daerah 2. Kompetisi Politik 	<p>Hasil pengujian dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kekayaan pemerintah daerah, kompetisi politik, opini audit, dan indeks pembangunan manusia memiliki berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas IFR pada pemerintah daerah di</p>

	Indonesia (Praditya Putra Perdana & (Achmad & Efendi, 2018)	3. Opini Audit 4. Indeks Pembangunan Manusia	Indonesia.
--	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------

2.3 Kerangka Konseptual

2.3.1 Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Persaingan politik adalah persaingan yang bertujuan untuk mendapatkan kendali atas kekuasaan pemerintah dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kepentingan sosial dan politik. Persaingan politik antar pimpinan daerah tidak terlepas dari campur tangan partai politik. Partai politik berperan penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Peraturan yang mewajibkan partai politik untuk mengangkat calon kepala daerah merupakan tantangan besar di Indonesia. Hal ini menyebabkan persaingan politik yang semakin ketat di Indonesia. Partai politik bersaing untuk mencalonkan calon kepala daerah.

Teori keagenan menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki lebih banyak informasi daripada yang dimiliki masyarakat. Pemerintah daerah cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan partai politik, yang mengarah pada asimetri informasi. Masyarakat merupakan partai politik yang tidak ikut serta secara langsung dalam pengawasan kegiatan pemerintahan, sehingga mengakibatkan kurangnya informasi. Masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan informasi keuangan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai media pengawasan. Pemberian informasi tersebut

menunjukkan bahwa pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Teori institutional juga menunjukkan bahwa entitas dengan daya saing politik yang lebih tinggi akan lebih mudah dilihat di publik, dan akan ada tekanan yang lebih besar untuk memberikan informasi keuangan daerah di situs web resmi pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan persaingan politik yang ketat akan memiliki insentif yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi dan citra publiknya. Persaingan politik yang semakin ketat akan mengarah pada pengawasan oleh partai lain dan masyarakat terhadap pejabat pengawas, yang terkadang melupakan janji yang mereka buat pada pemilihan umum pertama (Nosihana & Yaya, 2016). Para pesaing kepala daerah pada pemilihan kepala daerah pasca-konflik dan partai politik yang tidak mendukung para kepala daerah petahana membutuhkan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja pemerintah saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Nosihana & Yaya (2016) telah menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan melalui internet. Hasil penelitian ini menguatkan teori keagenan kompetisi politik yang tinggi akan mendorong pemerintah daerah semakin transparan menyediakan laporan keuangan pada website yang dimiliki.

Kompetisi politik yang ketat telah mengedepankan persyaratan yang lebih tinggi untuk transparansi informasi keuangan daerah. Hal ini terjadi karena semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi ini untuk memahami keadaan pemerintah, khususnya keadaan keuangan pemerintah daerah. Dengan

memberikan informasi keuangan tentang pemerintah daerah, semua pihak dapat memenuhi persyaratan transparansi informasi keuangan daerah. Pemerintah daerah berharap dapat membangun citra yang baik di masyarakat dan pihak terkait lainnya. Tingkat persaingan politik yang tinggi akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan informasi keuangan daerah sehingga dapat memuaskan kepentingan semua pihak.

2.3.2 Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Keteraksesan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah.

Administrasi publik di tingkat daerah terutama diatur oleh politisi yang memiliki peran dan posisi strategis dalam pengendalian kebijakan keuangan daerah. Afriansyah, 2013 mengemukakan bahwa perilaku oportunistik semacam ini dapat dikurangi jika terdapat oposisi yang kuat terhadap kelompok pengawas dalam pemerintahan. Teori keagenan menjelaskan bahwa persaingan politik yang ketat akan meningkatkan jumlah partai politik yang terlibat dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Hal ini terjadi karena para pihak ingin memperoleh informasi yang sama dengan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengakses informasi keuangan daerah, perbedaan informasi dapat diatasi. Menurut teori sistem, kemudahan mencari dan memperoleh informasi keuangan daerah merupakan salah satu syarat masyarakat dan pemangku kepentingan kepada pemerintah daerah.

Partai politik pendukung pemimpin daerah adalah bagian dari kompetisi politik. Kompetisi politik yang ketat membuat pemerintah daerah lebih mampu

memuaskan kepentingan semua pihak. Semakin banyak partai politik yang mendukung pimpinan daerah, masyarakat, dan partai politik lainnya, terutama para pesaing dari kepala daerah dalam pemilukada, maka semakin dituntut pemerintah daerah untuk semakin transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas keuangan daerah dapat dicapai dengan memfasilitasi akses informasi keuangan daerah. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah tidak hanya berpedoman pada kepentingan pribadinya. Semakin banyak partai, semakin beragam persyaratan masing-masing pihak. Tingkat persaingan politik yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pihak lain.

2.3.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif. Hal ini dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia daerah bahwa pencapaian pembangunan manusia diukur dari berbagai elemen dasar kualitas hidup di daerah tersebut. Tingkat pengembangan masyarakat menunjukkan tingkat kemajuan yang telah dicapai masyarakat (Setyowati, 2016). Sumber daya manusia merupakan faktor penting dari internet sebagai media transmisi informasi keuangan daerah.

Penelitian Setyowati (2016) menunjukkan bahwa pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi pembangunan masyarakat akan menimbulkan tuntutan

masyarakat kepada pemerintah untuk menyediakan informasi keuangan yang lebih lengkap dan rinci.

Semakin tinggi perkembangan masyarakat maka semakin baik kualitas sumber daya manusianya, sehingga keinginan masyarakat akan semakin beragam. Berbagai keinginan masyarakat tersebut akan menimbulkan tuntutan kepada pemerintah daerah, agar masyarakat juga dapat memperoleh informasi yang lebih luas tentang pengelolaan APBD. Pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberikan informasi keuangan daerah yang lebih lengkap. Masyarakat yang berkualitas akan sadar akan perannya dalam pemerintahan daerah. Masyarakat akan mengetahui bahwa mereka memiliki hak dan peran dalam mengawasi kegiatan pemerintahan. Informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Transparansi pengelolaan anggaran daerah salah satunya adalah dengan menyediakan informasi keuangan daerah yang mudah diakses. Apabila masyarakat juga mengetahui maksud dan manfaat dari informasi ini, mungkin akan berguna untuk memberikan informasi keuangan daerah. Orang yang memenuhi syarat akan mengetahui manfaat informasi keuangan di daerah tersebut. Masyarakat juga dapat menganalisis informasi keuangan daerah, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan pemerintah daerah yang sedang berjalan oleh pemerintah daerah.

2.3.4 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Keteraksesan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah.

Tata kelola yang baik membutuhkan komunitas yang berkembang dengan baik. Terlihat dari indeks pembangunan manusia masing-masing daerah yang tingkat pembangunan masyarakatnya sangat tinggi. Pembangunan komunitas yang baik akan melahirkan komunitas yang berkualitas. Sumber daya manusia yang memadai memberikan dukungan bagi perkembangan teknologi dan informasi.

Teori keagenan didasarkan pada dampak indeks pembangunan manusia terhadap aksesibilitas informasi keuangan pemerintah daerah, yaitu semakin tinggi indeks pembangunan manusia berarti kualitas sumber daya manusia semakin baik. Perbedaan antara informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan publik akan berkurang dengan cara pemerintah memberikan informasi yang dimilikinya kepada publik. Pemerintah daerah tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memperhatikan kenyamanan informasi. Penyampaian laporan keuangan kepada publik juga menunjukkan adanya praktek pengelolaan pemerintahan yang baik. Kualitas masyarakat yang tinggi akan meningkatkan kemauan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu berperan dengan mengawasi perkembangan kegiatan pemerintahan daerah. Pengawasan keuangan daerah oleh masyarakat dilakukan melalui informasi keuangan daerah. Masyarakat yang berkualitas akan mengetahui langkah-langkah untuk dapat mengakses dan memperoleh informasi keuangan dari pemerintah daerah. Peningkatan kualitas masyarakat juga dapat mendorong pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Pemerintah

daerah juga akan meningkatkan akses informasi agar masyarakat dapat melihat bahwa tata kelola mereka berjalan dengan baik.

2.3.5 Pengaruh *Leverage* terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah.

Styles & Tennyson (2007) percaya bahwa pembiayaan belanja pemerintah saat ini akan mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan dan rencana yang komprehensif bagi masyarakat di masa depan. Hutang yang digunakan untuk mendanai kegiatan masyarakat memberikan dorongan bagi para pemimpin daerah untuk mengurangi biaya hutang (Zimmerman & Wieder, 1977), (Laswad et al., 2005). Pemerintah daerah tidak ingin menjadi fokus perhatian pemberi pinjaman (Sinaga, 2011). (Rahman et al., 2013) melakukan penelitian tentang pengaruh leverage pada pelaporan informasi keuangan Internet, dan menunjukkan bukti bahwa *debt financing ratio (leverage)* berdampak pada pelaporan informasi keuangan Internet.

Teori keagenan memberikan alasan mengenai pengaruh leverage terhadap ketersediaan informasi keuangan pemerintah daerah. Teori tersebut menunjukkan bahwa jumlah utang menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan informasi keuangan daerah. Menurut teori keagenan, informasi yang dimiliki pemerintah lebih banyak memuat informasi tentang jumlah total utang pemerintah daerah. Pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan informasi tentang utangnya karena tidak ingin kinerjanya dinilai buruk. Teori institutional juga menjelaskan bahwa besarnya hutang akan menyebabkan organisasi menerapkan *coercive isomorphism*. Hal itu dilakukan untuk memenuhi tekanan dari semua

pihak, terutama kreditor. *coercive isomorphism* dapat berupa pemberian informasi keuangan kepada pemerintah daerah.

Hutang yang dipegang oleh pemerintah daerah merupakan bagian sensitif dari pemerintah daerah. Semakin tinggi jumlah hutang, terlihat pendapatan pemerintah daerah tidak mampu membiayai kegiatan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan nilai *leverage* tinggi seringkali enggan memberikan informasi kepada publik atau kreditor. Hal itu dilakukan karena *leverage* pemerintah bernilai tinggi sehingga kinerjanya dinilai buruk. Informasi ini cenderung disimpan oleh pemerintah agar masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan tidak memahami permasalahan yang ada di pemerintahan. Dapat diasumsikan bahwa penjelasan tersebut adalah semakin tinggi nilai *leverage* pemerintah daerah maka semakin rendah pemerintah daerah yang memberikan informasi keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan nilai *leverage* yang lebih rendah lebih cenderung memberikan informasi keuangan daerah, sehingga kinerja pemerintah daerah terlihat baik.

2.3.6 Pengaruh *Leverage* terhadap Keteraksesan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah dalam hubungan keagenan dipercaya dari masyarakat sebagai agen untuk melaksanakan tugas pemerintahan yaitu memberikan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mempercayai pemerintah untuk menggunakan dan mengelola sumber daya yang ada dan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dikemudian hari. Hubungan antar teori keagenan menimbulkan pertanyaan berupa asimetri informasi. Transparansi dan

akuntabilitas merupakan metode yang dapat digunakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah asimetri informasi.

Laswad et al. (2005) berpendapat bahwa penggunaan utang untuk menggalang dana bagi pelayanan publik akan menyebabkan para pemimpin daerah berusaha untuk menekan biaya utang. Medina (2012) menunjukkan bahwa leverage berdampak negatif terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah di situs resmi pemerintah daerah. Teori kelembagaan menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan daerah dalam konteks praktik pelaporan keuangan untuk mengatasi tekanan kreditor.

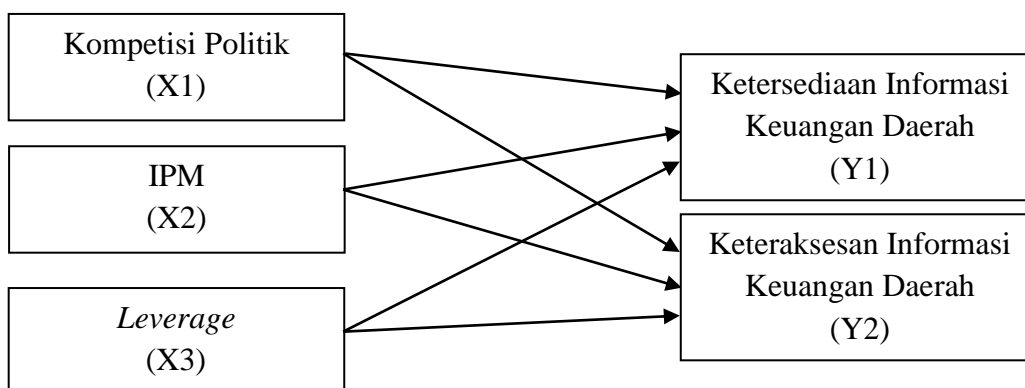
Tingkat *leverage* yang tinggi akan menghalangi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada publik, kreditor dan pihak berkepentingan lainnya. Jika pemerintah komunitas mengetahui tingkat *leverage* pemerintah daerah tinggi, mereka akan menilai kinerja pemerintah daerah rendah. Orang beranggapan kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan pemerintah lemah. Hal ini terjadi karena pendapatan pemerintah daerah tidak dapat mendanai operasional pemerintah. Pemerintah daerah yakin bahwa kreditor kembali mempertimbangkan untuk memberikan utang kepada pemerintah daerah karena tingginya tingkat pembiayaan utang. Kreditor dapat melihat kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi utangnya, sehingga dapat menjadi dasar bagi kreditor untuk mengembalikan utangnya kepada pemerintah daerah.

Leverage menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pihak lain dalam mengakses informasi keuangan daerah. Semakin rendah nilai *leverage* yang dimiliki

pemerintah maka akan semakin mudah memperoleh informasi keuangan dari pemerintah daerah. Pemerintah dengan nilai *leverage* tinggi seringkali tidak mudah memberikan informasi keuangan daerah karena memiliki risiko yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kompetisi politik (X1), indeks pembangunan manusia (X2), dan leverage (X3) berpengaruh terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan pemerintah daerah (Y).

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono 2018:99).

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1a: Kompetisi politik berpengaruh secara signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Se-Luwu Raya.

- H1b: Kompetisi politik berpengaruh secara signifikan terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Se-Luwu Raya.
- H2a: Indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Se-Luwu Raya.
- H2b: Indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Se-Luwu Raya.
- H3a: *Leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Se-Luwu Raya.
- H3b: *Leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Se-Luwu Raya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian ilmiah yang sistematis dengan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena, baik pada bagian-bagian maupun pada hubungannya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan studi pada pemerintah daerah se-Luwu Raya. Waktu penelitian dilakukan pada bulan agustus sampai dengan oktober 2021.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2016) definisi Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur atau yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Sekretariat daerah kota Palopo, Sekretariat daerah kabupaten Luwu, Sekretariat daerah kabupaten Luwu utara dan Sekretariat daerah kabupaten Luwu timur.

3.3.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2016) dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Metode purposive sampling adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun sampel yang nantinya akan digunakan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan peneliti. Kriteria tersebut adalah:

- 1) Jumlah pejabat Eselon II-IV Se-Luwu Raya
- 2) Masa bakti kepegawaian minimal 10 tahun

Tabel 3.1
Hasil Purposive Sampling

Kriteria Sampel	Jumlah
Jumlah pejabat Eselon II-IV Se-Luwu Raya	
- Kota Palopo	951
- Kab. Luwu	783
- Kab. Luwu Utara	769
- Kab. Luwu Timur	752
Total	3.255
Pengurangan Sampel Kriteria 1:	
Masa Bakti Kepegawaian kurang dari 10 tahun	3.195
Total Sampel	60

Responden dalam penelitian ini adalah jumlah pejabat Eselon Se-Luwu Raya yang meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 60 kuesioner dan jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 52 kuesioner atau tingkat pengambilan data kuesioner sebanyak 87%. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Pengumpulan Data Primer Penelitian

NO	Keterangan	Jumlah Kusioner	Persentase (%)
1	Distribusi Kusioner	60	100%
2	Kusioner Kembali	52	87%
3	Kusioner Cacat/tidak kembali	0	0%
4	Kusioner yang dapat diolah	52	87%
n = Sampel yang kembali			
Responden rate = $\frac{52}{60} \times 100\%$			
60			
= 87%			

Sumber data : data primer diolah (2021)

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data dilapangan langsung. Yang mana data tersebut diperoleh dengan menyebarkan kuesioner ataupun wawancara secara lansung.

3.4.2 Sumber Data

Data ini diperoleh dari jawaban responden atas pernyataan yang disajikan dalam kuestioner yang disebar kepada Sekretariat daerah se-Luwu Raya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner (angket) yang berisi pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Peneliti menggunakan kuesioner langsung, dimana kuesioner ini diantar langsung kepada responden Sekretariat Daerah se-Luwu Raya.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian mengenai “pengaruh kompetisi politik, Indeks Pembangunan Manusia dan *leverage* terhadap keteraksesan dan ketersediaan informasi keuangan daerah (studi pada pemerintah daerah se-Luwu Raya). Ada 5 variabel pada penelitian ini yaitu kompetisi politik, IPM, *leverage*, keteraksesan dan ketersediaan informasi keuangan daerah.

3.6.1 Definisi Variabel Penelitian

Tabel 3.3
Definisi dan Indikator Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Definsi	Indikator Penelitian	Skala	Sumber
1	Kompetisi Politik (X1)	Kompetisi politik yang besar akan menghasilkan pengawasan yang semakin besar pula dan Pemda (khususnya kepala daerah) sebagai pihak yang diawasi akan menanggung <i>monitoring cost</i> yang besar pula.	1. Tingkat ketatnya persaingan calon kepala daerah 2. Pelaporan informasi	Ordinal	(Laswad et al., 2005)
2	IPM (X2)	Sumber daya manusia yang berkualitas membuat masyarakat semakin sadar akan kebutuhan informasi keuangan daerah	1. Tingkat Pendidikan 2. Jumlah Penduduk 3. Kapasitas Sumber Daya Manusia	Ordinal	Badan Pusat Statistik
3	Leverage (X3)	Kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya	1. Tingkat Leverage	Ordinal	(Laswad et al., 2005)
4	Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (Y1)	Tingkat ketersediaan dokumen-dokumen	1. Ketepatan waktu 2. Kelengkapan Dokumen LKPD 3. Dapat dipahami 4. Relevan	Ordinal	(Styles & Tennyson, 2007)
5	Keteraksesan Informasi Keuangan	Tingkat kemudahan pengguna menemukan dan melihat laporan keuangan	1. Kemudahan Akses 2. Website Pemda 3. Infomasi Keuangan dapat	Ordinal	(Styles & Tennyson, 2007)

daerah (Y2)		diunduh dalam format PDF atau HTML		
----------------	--	------------------------------------------	--	--

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif analisis data merupakan kegiatan setelah data penelitian semua terkumpul. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert* yang memiliki 5 poin *rating* yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Alternatif Jawaban dengan Skala *Likert*

Simbol	Alternatif Jawaban	Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

3.8 Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah kuesioner kembali dan sudah diisi oleh responden adalah metode analisis yang sesuai untuk digunakan. Selanjutnya yaitu memberikan dan menjumlahkan bobot jawaban dari pertanyaan setiap variabel. Metode analisis yang digunakan peneliti yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji hipotesis dan analisis linear berganda.

3.8.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Grahita Chandrarin (2017) tujuan dari uji statistik deskriptif adalah untuk menguji dan mendeskripsikan karakteristik sampel yang diobservasi. Hasil uji statistik deskriptif biasanya berupa yang berisi variabel yang diobservasi, mean,

deviasi standar, maksimum dan minimum, dan kemudian diikuti penjelasan berupa narasi tentang interpretasi isi tabel tersebut.

3.8.2 Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti akan digunakan sebagai alat pembuktian hipotesis. Untuk menguji keabsahan jawaban dari responden agar instrumen layak dipakai maka peneliti akan melakukan pengujian berikut ini:

3.8.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuesioner tersebut. Kuesioner penelitian dikatakan valid jika nilai signifikansi $< 0,05$. Kriteria pengujian apabila nilai $\text{pearson correlation} < r_{\text{table}}$ maka item pernyataan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai $\text{pearson correlation} > r_{\text{table}}$ maka item pernyataan dikatakan valid.

3.8.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2016). Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam menguji reliabilitas data pada penelitian akan menggunakan formula

Cronbach's Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2016).

3.8.3 Uji Hipotesis

3.8.3.1 Uji Signifikan Variabel (Uji Statistik t)

Menurut Grahita Chandrarin (2017) Uji t merupakan pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen signifikan terhadap variabel dependen yang dipormulasikan dalam model. Uji ini merupakan uji lanjutan ketika ada kepastian dari uji F yang hasilnya signifikan. Kriteria signifikansi variabel untuk teknik analisis regresi linear berganda sama dengan kriteria signifikansi pada teknik analisis regresi linear sederhana. Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai t dan nilai signifikansi p. jika hasil analisis menunjukan nilai $p \leq 0,05$ maka pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen secara statistic signifikan pada level alfa sebesar 5%. Sebaliknya jika hasil analisis menunjukan nilai $p > 0,005$, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara statistic tidak signifikan.

3.8.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Grahita Chandrarin (2017) Uji koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel yang dimasukkan dalam model regresi, dimana setiap penambahan satu variabel bebas dan pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai R² meskipun variabel yang dimasukkan itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Untuk mengurangi

kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan, Adjusted R Square (R^2_{adj}). Koefisien determinasi yang telah disesuaikan berarti bahwa koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan unsur jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Dengan menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan, maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu dapat naik atau turun akibat adanya penambahan variabel baru dalam model.

3.8.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagaimana yang diformulasikan dalam suatu model persamaan regresi linear sederhana sudah tepat. Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai F dan nilai signifikansi p. Jika hasil analisis menunjukkan nilai $P \leq 0,05$ maka model persamaan regresinya signifikan pada level alfa sebesar 5%., sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linear berganda sudah tepat. Begitupun sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan nilai $p > 0,05$ maka model persamaan regresinya tidak signifikan pada level alfa sebesar 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linear berganda belum tepat. Uji model ini merupakan uji yang harus dipenuhi terlebih dahulu signifikannya sebelum melanjutkan ke uji signifikansi (uji t). Uji F ini bersifat necessary condition yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji signifikansi variabel (Chandrarini 2017).

3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan yang menyoroti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode

analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Pengolahan data menggunakan program, *Statistik Product and Service Solution (SPSS) for windows versi 22*.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan formulasi matematis sebagai berikut:

$$Y1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_i$$

$$Y2 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_i$$

Y1 = Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah

Y2 = Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah

a = Konstanta

b₁ - b₃ = Koefisien Regresi

X₁ = Kompetisi Politik (POLCOMP)

X₂ = Indek Pembangunan Manusia (IPM)

X₃ = *Leverage* (LEV)

e_i = Eror

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

a. Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palopo

1. Sejarah Singkat Sekretariat Daerah Kota Palopo

Kota Palopo berdiri pada tahun 2002 berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo akhirnya dibentuk menjadi sebuah Daerah Otonom dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri. Dengan dibentuknya Kota Palopo menjadi daerah otonom maka dibentuklah unit kerja sebagai pembantu pimpinan pemerintah daerah yaitu sekretaris daerah. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat daerah kota Palopo tercantum dalam Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

2. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Palopo

Visi Sekretariat daerah kota Palopo bersinergi dengan visi kota palopo. Adapun visi dari kota Palopo 2018-2023 yaitu: “Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada Tahun 2023”.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

- a) Maju, Kota bergerak kearah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat perekonomian dan kesejahteraan.
- b) Inovatif, kota palopo selalu memberi solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan publik yang efisien, efektif, modern, dan mengarusutamakan riset serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.
- c) Berkelanjutan, perkembangan kota dilakukan secara harmoni, sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, bersifat inklusif secara sosial dan memerhatikan kelestarian budaya lokal.

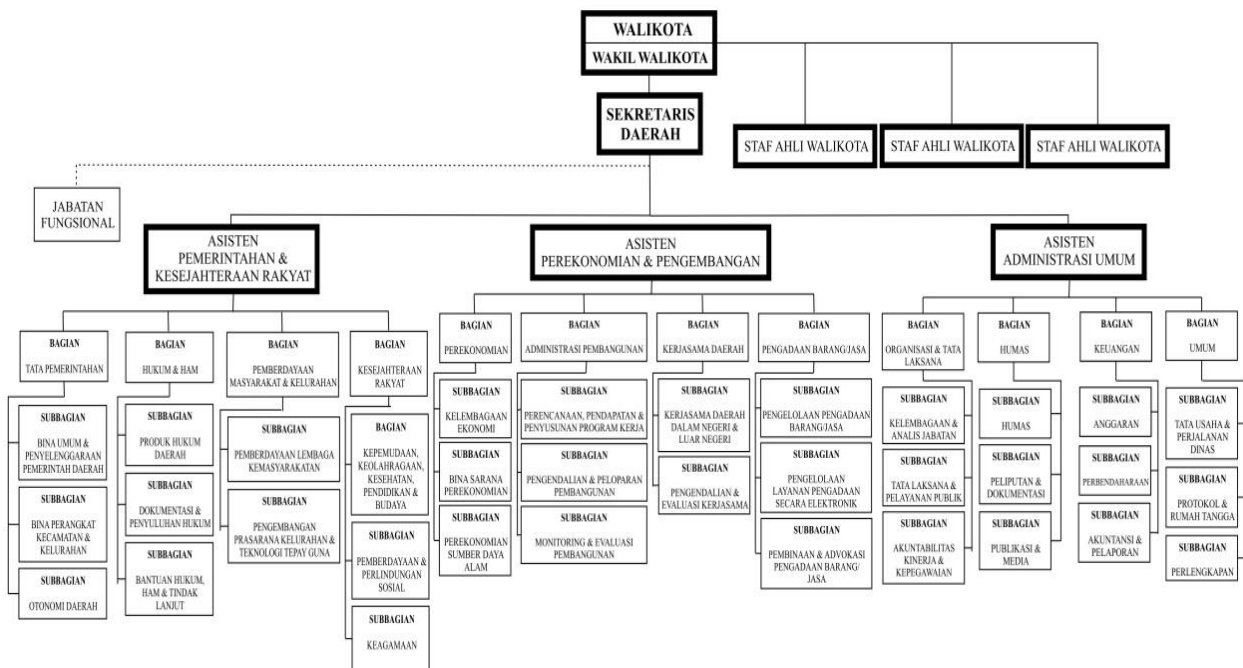
Dari Visi di atas maka Misi kota palopo 2018-2023 yaitu:

- a) Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminandan perlindungan sosial untuk kelompok rentan.
- b) Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruanagan terbuka hijau.
- c) Memodemisasi layanan publik, meningkatkan layanan aparatur dan tata kelola pemerintah, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.
- d) Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup permodalan dan pendamping bisnis. Mewujudkan

iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dan bercirikan nilai budaya Luwu.

3. Struktur Organisasi Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palopo

Adapun struktur organisasi Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palopo adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Sekretaris Daerah Kota Palopo

b. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu

1. Sejarah Singkat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Pemekaran ini turut menjadikan Kota Palopo selaku perintahan otonom kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.000,25 km², sebelum Kota Palopo menjadi kota otonom

dengan jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km. Pemekaran kabupaten Luwu yang kemudian melahirkan kabupaten Luwu Utara dan kota otonom Palopo di bawah kepemimpinan Bupati Luwu Dr. Kamrul Kasim yang menjabat Bupati Luwu dari tahun 1999 sampai tahun 2003.

Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari kota Palopo ke kota Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibu kota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibu kota sejak 13 Februari 2006. Periode 2004-2009 Luwu dipimpin oleh Bupati H.M. Basmin Mattayang kemudian dilakukan pemilihan Kepala Daerah langsung pertama di daerah itu dan memilih Ir. H. Andi Mudzakkar sebagai bupati terpilih periode 2009-2014.

2. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu

Visi Sekretariat daerah kabupaten Luwu bersinergi dengan visi Bupati Luwu. Adapun visi dari Bupati Luwu yaitu: “Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religius”.

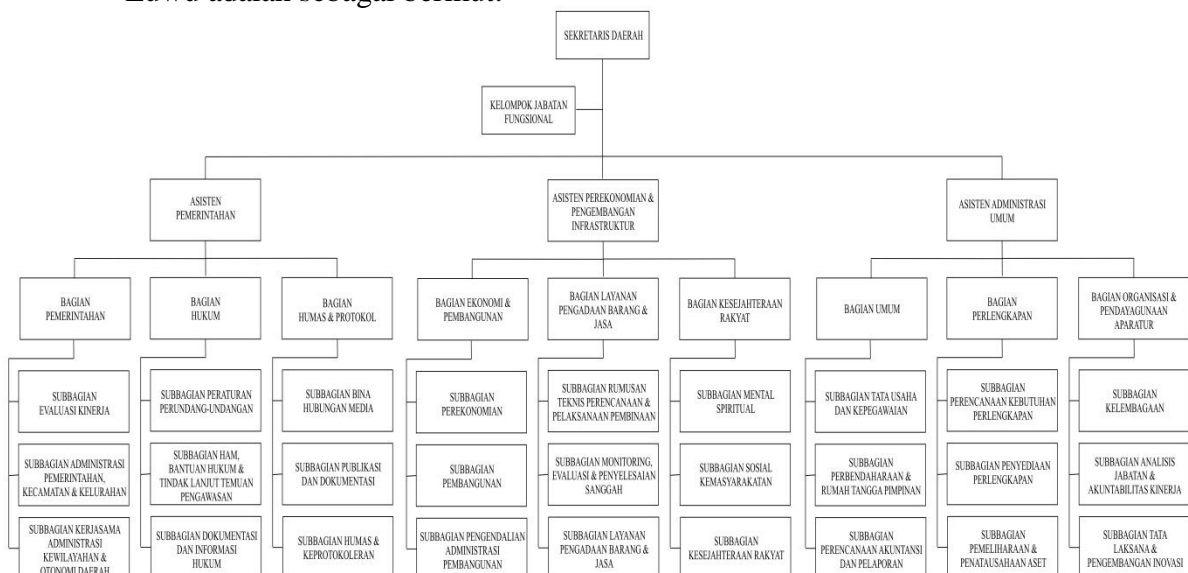
Visi ini akan diwujudkan dalam Misi, yaitu:

- a) Mewujudkan pemerintahan yang professional
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
- d) Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.

- e) Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agrobisnis
- f) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten luwu yang religious
- g) Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat pedesaan
- h) Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan system pengupahan yang berkeadilan
- i) Penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk mendorong Partisipasi Publik yang dinamis dan konstruktif,
- j) Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana

3. Struktur Organisasi Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu

Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Luwu

c. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

1. Sejarah Singkat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara

Pada tahun 1999, saat awal bergulirnya Reformasi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dimana telah dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, dan mengubah mekanisme pemerintahan yang mengarah pada Otonomi Daerah.

Tepatnya pada tanggal 10 Pebruari 1999, oleh DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999 tentang Usul dan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi menjadi dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No.136/776/OTODA tanggal 12 Pebruari 1999. Akhirnya pada tanggal 20 April 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan UU Republik Indonesia No.13 Tahun1999.

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Luwu Utara dengan batas Saluampak Kec. Sabbang sampai dengan batas Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, terdiri dari 19 Kecamatan, yaitu: Kec. Sabbang, Kec. Pembantu Baebunta, Kec. Limbong, Kec. Pembantu Seko, Kec. Malangke, Kec. Malangkebarat, Kec. Masamba, Kec. Pembantu Mappedeceng, Kec. Pembantu Rampi, Kec. Sukamaju, Kec. Bone-bone, Kec. Pembantu Burau, Kec. Wotu, Kec. Pembantu Tomoni, Kec. Mangkutana, Kec. Pembantu Angkona, Kec. Malili, Kec. Nuha dan Kec. Pembantu Towuti

Pada tahun 2003, di usianya yang ke-4, Kabupaten Luwu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Timur yang disahkan

dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km², dengan Kecamatan masing-masing: Angkona, Burau, Malili, Mangkutana, Nuha, Sorowako, Tomoni, Tomoni Utara, Towuti dan Wotu

Dengan demikian, pasca pemekaran tersebut Kabupaten Luwu Utara terdiri dari sebelas kecamatan masing-masing Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko, Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone Bone .

2. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara

Visi Sekretariat daerah kabupaten Luwu Utara bersinergi dengan visi Bupati Luwu Utara. Adapun visi dari Bupati Luwu Utara yaitu: “ Luwu Utara Yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal”.

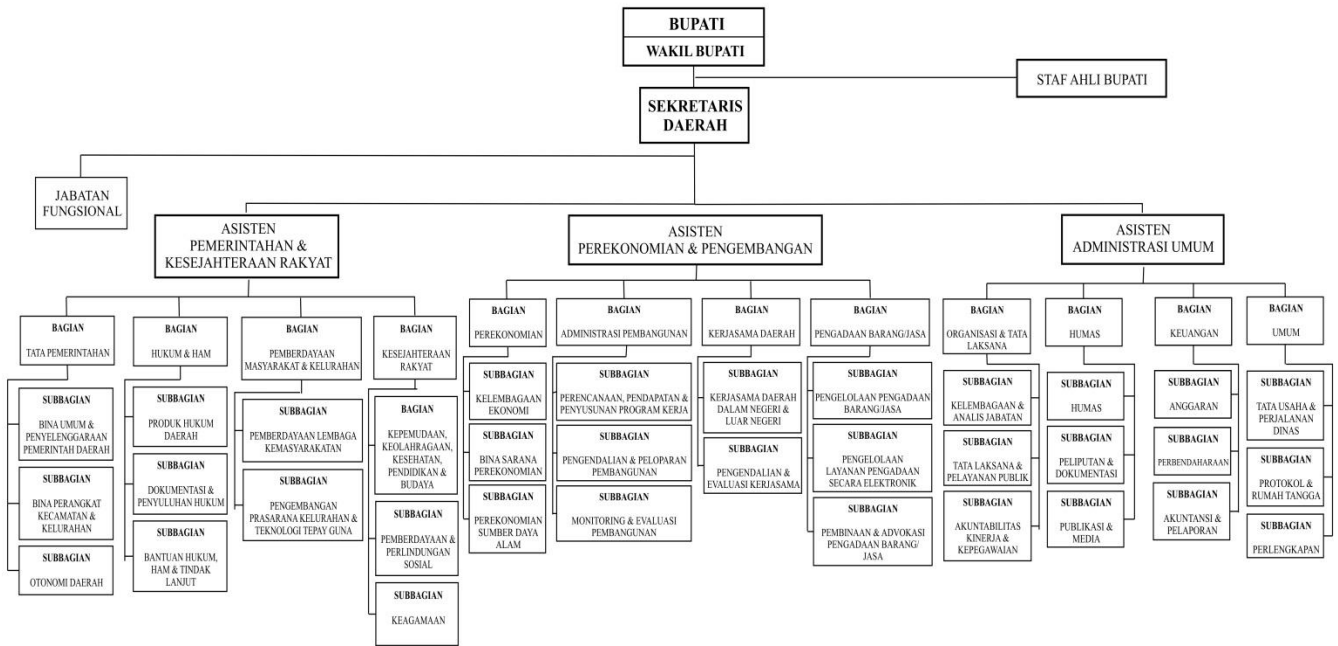
Visi ini akan diwujudkan dalam Misi, yaitu:

- a) Mewujudkan masyarakat yang religius tatakelola pemerintahan yang baik dan komunitas, adat yang berdaya
- b) Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni
- c) Mewujudkan pendidikan, berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya
- d) Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim, investasi dan daya tarik pariwisata

- e) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup
- f) Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah
- g) Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif

3. Struktur Organisasi Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara

c. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

1. Sejarah Singkat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur

Kerinduan masyarakat di wilayah eks Onder-afdeling Malili atau bekas Kewedanaan Malili, untuk membentuk suatu daerah otonom sendiri telah terwujud. Kabupaten Luwu Timur yang terbentang dari Kecamatan Bauru di

sebelah barat hingga Kecamatan Towuti di sebelah timur, membujur dari Kecamatan Mangkutan di sebelah utara hingga Kecamatan Malili di sebelah selatan, diresmikan berdiri pada tanggal 3 Mei 2003.

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002, tentang Persetujuan usul pemekaran Luwu Utara. Gubernur Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan mengusulkan pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 130/2172/Otoda tanggal 30 Mei 2002. Akhirnya, aspirasi perjuangan masyarakat Luwu Timur yang diperjuangkan selama 44 tahun telah mencapai titik kulminasi yaitu atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dengan disahkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang - Undang tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2003 telah meresmikan sekaligus melantik penjabat Bupati Luwu Timur di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2003, sebagai penanda mulai berlangsungnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang baru terbentuk itu, maka Bupati Luwu Utara dan Penjabat Bupati Luwu Timur secara bersama-sama meresmikan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama perbatasan bertempat di Desa Lauwo antara

Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Bone - Bone, Kabupaten Luwu Utara. Pada hari yang sama dilakukan prosesi penyerahan operasional Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bertempat di lapangan Andi Nyiwi, Malili. Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara maka secara administratif Kabupaten Luwu Timur berdiri sendiri sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun secara kultural, historis dan hubungan emosional sebagai satu rumpun keluarga Tanah Luwu tetap terjalin sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya dilakukan beberapa revisi terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah yang terdiri dari : 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 3 (tiga) Staf Ahli, 9 (Sembilan) Bagian dan 27 (dua puluh tujuh) Sub bagian.

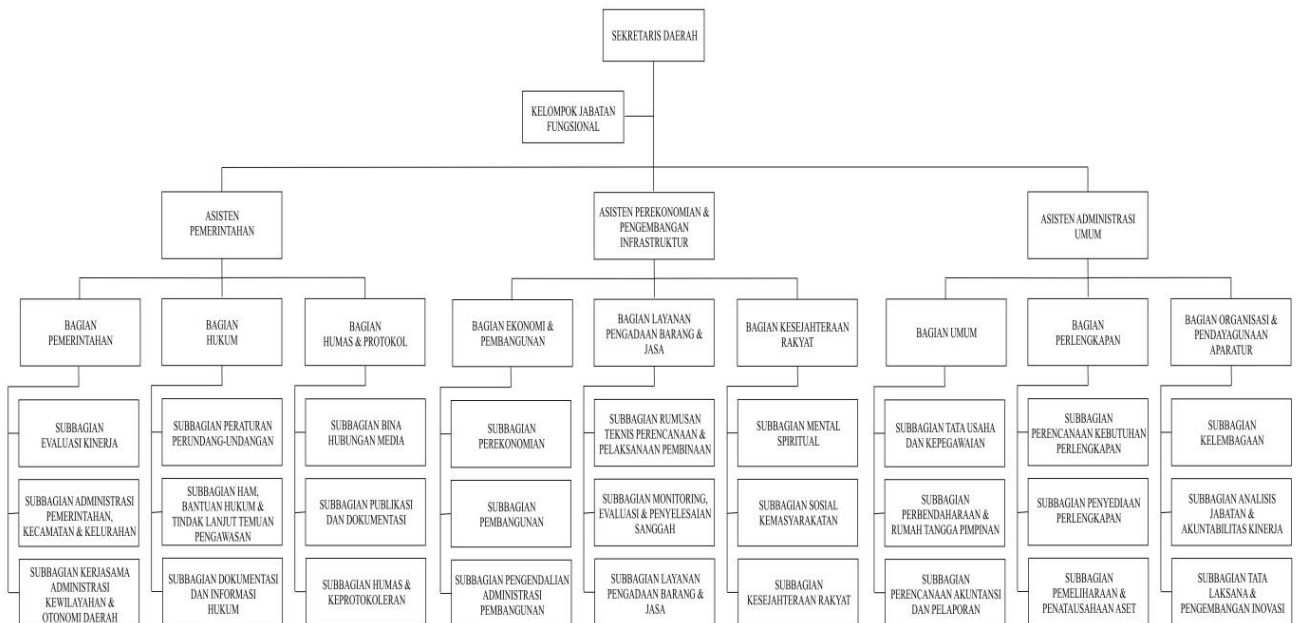
2. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur

Visi Sekretariat Daerah yaitu “tata kelola pemerintah yang baik dan berorientasi pelayanan public dalam rangka mendukung Kabupaten Luwu Timur Terkemuka 2021” yang ditekankan kepada misi Sekretariat Daerah, yaitu:

- a) Mewujudkan Reformasi Birokrasi untuk Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan kinerja pelayanan public
- b) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan serta kokohnya interaksi social, agama, budaya dan kemasyarakatan
- c) Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan

3. Struktur Organisasi Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

4.2 Deskripsi Statistik

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Grahita Chandrarin (2017) tujuan dari uji statistik deskriptif adalah untuk menguji dan mendeskripsikan karakteristik sampel yang diobservasi. Hasil uji statistic deskriptif biasanya berupa yang berisi variabel yang diobservasi, mean, deviasi standar, maksimum dan minimum, dan kemudian diikuti penjelasan berupa narasi tentang interpretasi isi tabel tersebut. Berdasarkan lampiran tabel deskriptif yang diolah dengan bantuan program aplikasi SPSS versi 22 sebagai berikut:

a. Variabel Kompetisi Politik

Untuk variabel kompetisi politik terdiri dari 6 item pertanyaan. Hasil dari pertanyaan responden sebagai berikut:

Tabel 4.1 Deskripsi Item Pertanyaan Kompetisi Politik

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
KP.1	2	9	17	20	4	3,29
	3,8%	17,3%	32,7%	38,5%	7,7%	
KP.2	0	7	21	15	9	3,50
	0%	13,5%	40,4%	28,8%	17,3%	
KP.3	0	5	29	13	5	3,35
	0%	9,6%	55,8%	25%	9,6%	
KP.4	0	3	20	23	6	3,62
	0%	5,8%	38,5%	44,2%	11,5%	
KP.5	0	2	19	15	16	3,87
	0%	3,8%	36,5%	28,8%	30,8%	
KP.6	0	1	17	19	15	3,92
	0%	1,9%	32,7%	36,5%	28,8%	

Sumber data : Lampiran 3, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.2 yang menunjukkan hasil dari 52 responden yang diteliti. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak

setuju 2 orang atau 3,8%, jawaban tidak setuju 9 orang atau 17,3%, jawaban netral 17 orang atau 32,7%, jawaban setuju 20 orang atau 38,5% dan jawaban sangat setuju 4 orang atau 7,7%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan pertama kompetisi politik.

Pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 7 orang atau 13,5%, jawaban netral 21 orang atau 40,4%, jawaban setuju 15 orang atau 28,8% dan jawaban sangat setuju 9 orang atau 17,3%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “netral” atas pertanyaan kedua kompetisi politik.

Pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 5 orang atau 9,6%, jawaban netral 29 orang atau 55,8%, jawaban setuju 13 orang atau 25% dan jawaban sangat setuju 5 orang atau 9,6%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “netral” atas pertanyaan ketiga kompetisi politik.

Pernyataan keempat, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 3 orang atau 5,8%, jawaban netral 20 orang atau 38,5%, jawaban setuju 23 orang atau 44,2% dan jawaban sangat setuju 6 orang atau 11,5%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan keempat kompetisi politik.

Pernyataan kelima, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 2 orang atau 3,8%, jawaban netral 17 orang atau 32,7%, jawaban setuju 15 orang atau 28,8% dan jawaban sangat setuju 16

orang atau 30,8%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “netral” atas pertanyaan kelima kompetisi politik.

Pernyataan keenam, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 1 orang atau 1,9%, jawaban netral 19 orang atau 23,7%, jawaban setuju 19 orang atau 36,5% dan jawaban sangat setuju 15 orang atau 28,8%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan keenam kompetisi politik.

b. Variabel Indeks Pembangunan Manusia

Untuk variabel indeks pembangunan manusia terdiri dari 5 item pertanyaan.

Hasil dari pertanyaan responden sebagai berikut:

Tabel 4.2 Deskripsi Item Pertanyaan Indeks Pembangunan Manusia

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
IPM.1	0	2	10	15	25	4,21
	0%	3,8%	19,2%	28,8%	48,1%	
IPM.2	0	2	15	23	12	3,87
	0%	3,8%	28,8%	44,2%	23,1%	
IPM.3	0	4	33	6	9	3,38
	0%	7,7%	63,5%	11,5%	17,3%	
IPM.4	0	4	29	12	7	3,41
	0%	7,7%	55,8%	23,1%	13,5%	
IPM.5	0	0	22	16	14	3,85
	0%	0%	42,3%	30,8%	26,9%	

Sumber data : Lampiran 3, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.3 yang menunjukkan hasil dari 52 responden yang diteliti. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 2 orang atau 3,8%, jawaban netral 10 orang atau 19,2%, jawaban setuju 15 orang atau 28,8% dan jawaban sangat setuju 25 orang atau 48,1%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata

responden memilih “sangat setuju” atas pertanyaan pertama indeks pembangunan manusia.

Pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 2 orang atau 3,8%, jawaban netral 15 orang atau 28,8%, jawaban setuju 23 orang atau 44,2% dan jawaban sangat setuju 12 orang atau 23,1%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan kedua indeks pembangunan manusia.

Pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 4 orang atau 7,7%, jawaban netral 33 orang atau 63,5%, jawaban setuju 6 orang atau 11,5% dan jawaban sangat setuju 9 orang atau 17,3%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “netral” atas pertanyaan ketiga indeks pembangunan manusia.

Pernyataan keempat, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 4 orang atau 7,7%, jawaban netral 29 orang atau 55,8%, jawaban setuju 12 orang atau 23,1% dan jawaban sangat setuju 7 orang atau 13,5%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “netral” atas pertanyaan keempat indeks pembangunan manusia.

Pernyataan kelima, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban netral 22 orang atau 42,3%, jawaban setuju 16 orang atau 30,8% dan jawaban sangat setuju 14 orang atau 26,9%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “netral” atas pertanyaan kelima indeks pembangunan manusia.

c. Variabel *Leverage*

Untuk variabel indeks pembangunan manusia terdiri dari 4 item pertanyaan.

Hasil dari pertanyaan responden sebagai berikut:

Tabel 4.3 Deskripsi Item Pertanyaan *Leverage*.

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
LEV.1	0	19	17	9	7	3,08
	0%	36,5%	32,7%	17,3%	13,5%	
LEV.2	0	16	12	17	7	3,29
	0%	30,8%	23,1%	32,7%	13,5%	
LEV.3	0	5	20	20	7	3,56
	0%	9,6%	38,5%	38,5%	13,5%	
LEV.4	0	3	27	11	11	3,58
	0%	5,8%	51,9%	21,2%	21,2%	

Sumber data : Lampiran 3, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.4 yang menunjukkan hasil dari 52 responden yang diteliti. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 19 orang atau 36,5%, jawaban netral 17 orang atau 32,7%, jawaban setuju 9 orang atau 17,3% dan jawaban sangat setuju 7 orang atau 13,5%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “tidak setuju” atas pertanyaan pertama *leverage*.

Pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 16 orang atau 30,8%, jawaban netral 12 orang atau 23,1%, jawaban setuju 17 orang atau 32,7% dan jawaban sangat setuju 7 orang atau 13,5%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan kedua *leverage*.

Pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 5 orang atau 9,6%, jawaban netral 20 orang

atau 38,5%, jawaban setuju 20 orang atau 38,5% dan jawaban sangat setuju 7 orang atau 13,5%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan ketiga *leverage*.

Pernyataan keempat, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 3 orang atau 5,8%, jawaban netral 27 orang atau 51,9%, jawaban setuju 11 orang atau 21,2% dan jawaban sangat setuju 11 orang atau 21,2%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “netral” atas pertanyaan keempat *leverage*.

d. Variabel Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah

Untuk variabel ketersediaan informasi keuangan daerah terdiri dari 6 item pertanyaan. Hasil dari pertanyaan responden sebagai berikut:

Tabel 4.4 Deskripsi Item Pertanyaan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
KTS.1	2	0	12	14	24	4,12
	3,8%	0%	23,1%	26,9%	46,2%	
KTS.2	2	0	15	15	20	3,98
	3,8%	0%	28,8%	28,8%	38,5%	
KTS.3	0	2	14	18	18	4,00
	0%	3,8%	26,9%	34,6%	34,6%	
KTS.4	0	3	8	26	15	4,02
	0%	5,8%	15,4%	50%	28,8%	
KTS.5	0	2	17	17	16	3,90
	0%	3,8%	32,7%	32,7%	30,8%	
KTS.6	0	2	10	25	15	4,02
	0%	3,8%	19,2%	48,1%	28,8%	

Sumber data : Lampiran 3, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.5 yang menunjukkan hasil dari 52 responden yang diteliti. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 2 orang atau 3,8%, jawaban tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban netral

12 orang atau 23,1%, jawaban setuju 14 orang atau 26,9% dan jawaban sangat setuju 24 orang atau 46,2%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “sangat setuju” atas pertanyaan pertama ketersediaan informasi keuangan daerah.

Pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 2 orang atau 3,8%, jawaban tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban netral 15 orang atau 28,8%, jawaban setuju 15 orang atau 28,8% dan jawaban sangat setuju 20 orang atau 38,5%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “sangat setuju” atas pertanyaan kedua ketersediaan informasi keuangan daerah.

Pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 2 orang atau 3,8%, jawaban netral 14 orang atau 26,9%, jawaban setuju 18 orang atau 34,6% dan jawaban sangat setuju 18 orang atau 34,6%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “sangat setuju” atas pertanyaan ketiga ketersediaan informasi keuangan daerah.

Pernyataan keempat, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 3 orang atau 5,8%, jawaban netral 8 orang atau 15,4%, jawaban setuju 26 orang atau 50% dan jawaban sangat setuju 15 orang atau 28,8%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan keempat ketersediaan informasi keuangan daerah.

Pernyataan kelima, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 2 orang atau 3,8%, jawaban netral 17 orang atau 32,7%, jawaban setuju 17 orang atau 32,7% dan jawaban sangat setuju 16 orang atau 30,8%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan kelima ketersediaan informasi keuangan daerah.

Pernyataan keenam, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 2 orang atau 3,8%, jawaban netral 10 orang atau 19,2%, jawaban setuju 25 orang atau 48,1% dan jawaban sangat setuju 15 orang atau 28,8%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan keenam ketersediaan informasi keuangan daerah.

e. Variabel Keteraksasan Informasi Keuangan Daerah

Untuk variabel keteraksasan informasi keuangan daerah terdiri dari 6 item pertanyaan. Hasil dari pertanyaan responden sebagai berikut:

Tabel 4.5 Deskripsi Item Pertanyaan Keteaksesan Informasi Keuangan

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
KTA.1	0	0	8	18	26	4,35
	0%	0%	15,4%	34,6%	50%	
KTA.2	0	3	9	25	15	4,00
	0%	5,8%	17,3%	48,1%	28,8%	
KTA.3	0	0	8	17	27	4,37
	0%	0%	15,4%	32,7%	51,9%	
KTA.4	0	0	13	20	19	4,12
	0%	0%	25%	38,5%	36,5%	
KTA.5	0	1	23	9	19	3,88
	0%	1,9%	44,2%	17,3%	36,5%	
KTA.6	0	0	15	19	18	4,06
	0%	0%	28,8%	36,5%	34,6%	

Sumber data : Lampiran 3, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.6 yang menunjukkan hasil dari 52 responden yang diteliti. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban netral 8 orang atau 15,4%, jawaban setuju 18 orang atau 34,6% dan jawaban sangat setuju 26 orang atau 50%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “sangat setuju” atas pertanyaan pertama keteraksesan informasi keuangan daerah.

Pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 3 orang atau 5,8%, jawaban netral 9 orang atau 17,3%, jawaban setuju 25 orang atau 48,1% dan jawaban sangat setuju 15 orang atau 28,8%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan kedua keteraksesan informasi keuangan daerah.

Pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban netral 8 orang atau 15,4%, jawaban setuju 17 orang atau 32,7% dan jawaban sangat setuju 27 orang atau 51,9%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “sangat setuju” atas pertanyaan ketiga keteraksesan informasi keuangan daerah.

Pernyataan keempat, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban netral 13 orang atau 25%, jawaban setuju 20 orang atau 38,5% dan jawaban sangat setuju 19 orang atau 36,5%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan keempat keteraksesan informasi keuangan daerah.

Pernyataan kelima, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 1 orang atau 1,9%, jawaban netral 23 orang atau 44,2%, jawaban setuju 9 orang atau 17,3% dan jawaban sangat setuju 19 orang atau 36,5%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “netral” atas pertanyaan kelima keteraksesan informasi keuangan daerah.

Pernyataan keenam, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban tidak setuju 0 orang atau 0%, jawaban netral 15 orang atau 28,8%, jawaban setuju 19 orang atau 36,5% dan jawaban sangat setuju 18 orang atau 34,6%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan keenam keteraksesan informasi keuangan daerah.

4.2.2 Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuesioner tersebut. Kuesioner penelitian dikatakan valid jika nilai signifikansi $< 0,05$. Kriteria pengujian apabila nilai pearson correlation $< r$ tabel maka item pernyataan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai pearson correlation $> r$ tabel maka item pernyataan dikatakan valid.

Hasil r hitung dari 6 pertanyaan (X1), 5 pertanyaan (X2), 4 Pertanyaan (X3), 6 pertanyaan (Y1) dan 6 pertanyaan (Y2) sehingga dalam kuesioner penelitian pada variable independen yaitu Kompetisi Politik (X1), Indek Pembangunan

Manusia (X2), *Leverage* (X3) dan variable dependen yaitu Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (Y1) dan Keteraksesan Informasi Keuangan Dearah (Y2). Variable tersebut dinyatakan valid apabila memiliki nilai r hitung $>$ r table. Hal tersebut dapat dilihat pada penyajian validitas setiap variabel sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r table	Keterangan
Kompetisi Politik	KP. 1	0,608	0,2732	Valid
	KP. 2	0,789	0,2732	Valid
	KP. 3	0,848	0,2732	Valid
	KP. 4	0,769	0,2732	Valid
	KP. 5	0,572	0,2732	Valid
	KP. 6	0,730	0,2732	Valid
IPM	IPM.1	0,655	0,2732	Valid
	IPM.2	0,749	0,2732	Valid
	IPM.3	0,799	0,2732	Valid
	IPM.4	0,613	0,2732	Valid
	IPM.5	0,715	0,2732	Valid
<i>Leverage</i>	LEV.1	0,862	0,2732	Valid
	LEV.2	0,934	0,2732	Valid
	LEV.3	0,693	0,2732	Valid
	LEV.4	0,787	0,2732	Valid
Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah	KTS.1	0,916	0,2732	Valid
	KTS.2	0,935	0,2732	Valid
	KTS.3	0,902	0,2732	Valid
	KTS.4	0,823	0,2732	Valid
	KTS.5	0,888	0,2732	Valid
	KTS.6	0,837	0,2732	Valid
Ketersaksesan Informasi Keuangan Daerah	KTA.1	0,818	0,2732	Valid
	KTA.2	0,393	0,2732	Valid
	KTA.3	0,808	0,2732	Valid
	KTA.4	0,780	0,2732	Valid
	KTA.5	0,717	0,2732	Valid
	KTA.6	0,699	0,2732	Valid

Sumber data : Lampiran 4, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan tentang Kompetisi Politik (X1), IPM (X2), *Leverage* (X3), Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (Y1) dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah (Y2) dapat dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{table}$.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam menguji reliabilitas data pada penelitian akan menggunakan formula *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.

Tabel 4.7 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kompetisi Politik (X1)	0,779	0,60	Reliabel
IPM (X2)	0,779	0,60	Reliabel
<i>Leverage</i> (X3)	0,822	0,60	Reliabel
Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (Y1)	0,813	0,60	Reliabel
Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah (Y2)	0,774	0,60	Reliabel

Sumber data : Lampiran 5, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* dari semua variable $> 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument dari kuesioner penelitian dapat dipercaya sebagai alat ukur dalam menjelaskan variabel

Kompetisi Politik (X1), IPM (X2), *Leverage* (X3), Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (Y1) dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah (Y2).

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Uji Signifikansi Variabel (Uji Statistik t)

Uji t merupakan pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen signifikan terhadap variabel dependen yang dipormulasikan dalam model. Hasil uji statistik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Uji Statistik t (Y1)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,047	4,701		3,201	0,002
	Kompetisi Politik (X1)	0,039	0,215	0,030	3,484	0,001
	IPM (X2)	0,421	0,287	0,260	4,6	0
	<i>Leverage</i> (X3)	-0,144	0,236	-0,095	-2,918	0,003

a. Dependent Variable: Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (Y1)

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

- Hipotesis yang pertama diketahui untuk kompetisi politik (X1) $t_{hitung} = 3,484 > t_{tabel} = 1,676$ dengan signifikan $0,001 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah.
- Hipotesis yang kedua untuk variabel IPM (X2) $t_{hitung} = 4,600 > t_{tabel} = 1,676$ dan signifikan $0,000 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan dalam terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah.
- Hipotesis yang kedua untuk variabel *leverage* (X3) $t_{hitung} = 2,918 > t_{tabel} = 1,676$ dan signifikan $0,000 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan dalam terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah.

Tabel 4.9 Uji Statistik t (Y2)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,012	3,084		4,867	0
	Kompetisi Politik (X1)	0,020	0,141	0,022	3,475	0,021
	IPM (X2)	0,473	0,188	0,418	2,517	0,015
	Leverage (X3)	-0,034	0,155	-0,032	-1,918	0,009

a. Dependent Variable: Keteraksasan Informasi Keuangan Daerah (Y2)

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

4. Hipotesis yang pertama diketahui untuk kompetisi politik (X1) $t_{hitung} = 3,475 > t_{tabel} = 1,676$ dengan signifikan $0,021 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan terhadap keteraksasan informasi keuangan daerah.
5. Hipotesis yang kedua untuk variabel IPM (X2) $t_{hitung} = 2,515 > t_{tabel} = 1,676$ dan signifikan $0,015 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan dalam terhadap keteraksasan informasi keuangan daerah.
6. Hipotesis yang kedua untuk variabel *leverage* (X3) $t_{hitung} = 1,918 > t_{tabel} = 1,676$ dan signifikan $0,009 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan dalam terhadap keteraksasan informasi keuangan daerah.

4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi (Y1)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,879 ^a	0,772	0,767	4,756

a. Predictors: (Constant), LEV, KP, IPM
b. Dependent Variable: Ketersediaan Infotmasi keuangan daerah (Y1)

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Berdasarkan table diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,772 artinya bahwa kompetisi politik, IPM, *leverage* memiliki pengaruh sebesar 77,2% terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah sedangkan 22,8% dipengaruhi oleh variable lain.

Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi (Y2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,989 ^a	0,882	0,877	3,120
a. Predictors: (Constant), LEV, KP, IPM				
b. Dependent Variable: Keteraksesan Infotmasi keuangan daerah (Y2)				

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Berdasarkan table diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,882 artinya bahwa kompetisi politik, IPM, *leverage* memiliki pengaruh sebesar 88,2% terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah sedangkan 11,8% dipengaruhi oleh variable lain.

4.2.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai signifikan 0,05.

Tabel 4.12 Uji Statistik F (Y1)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	106,397	3	35,466	3,568	0,009 ^b
	Residual	1085,526	48	22,615		
	Total	1191,923	51			
a. Dependent Variable: ketersediaan informasi keuangan daerah (Y1)						
b. Predictors: (Constant), LEV, KP, IPM						

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan $0,009 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 3,568 > F_{tabel} 2,57$. Dengan demikian bahwa semua variable independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen.

Tabel 4.13 Uji Statistik F (Y2)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	115,940	3	38,647	3,970	0,013 ^b
	Residual	467,291	48	9,735		
	Total	583,231	51			
a. Dependent Variable: keteraksesan informasi keuangan daerah (Y2)						
b. Predictors: (Constant), LEV, KP, IPM						

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan $0,013 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 3,970 > F_{tabel} 2,57$. Dengan demikian bahwa semua variable independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen.

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis data yang digunakan dalam model regresi berganda, yaitu model yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada analisis regresi berganda variabel tergantung (terikat) dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas sehingga hubungan fungsional antara variabel terikat.

Tabel 4.14 Analisis Regresi Linear Berganda (Y1)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,047	4,701		3,201	0,002

Kompetisi Politik (X1)	0,039	0,215	0,030	3,484	0,001
IPM (X2)	0,421	0,287	0,260	4,6	0
<i>Leverage</i> (X3)	-0,144	0,236	-0,095	-2,918	0,003
a. Dependent Variable: Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (Y1)					

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Dari tabel diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 15,047 dan nilai koefisien untuk variabel kompetisi politik adalah 0,039, IPM sebesar 0,421 dan *leverage* sebesar 0,144 maka persamaan regresi diperoleh sebagai berikut:

$$Y1 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

$$Y1 = 15,047 + 0,039 X1 + 0,421 X2 - 0,144 X3 + e$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh, mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Nilai konstan sebesar 15,047 bernilai positif yang artinya variabel kompetisi politik, IPM dan *leverage* bernilai 0 maka variabel ketersediaan informasi keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 15,047.
- b. Koefisien regresi variabel kompetisi politik (X1) mengalami kenaikan sebesar 0,039 yang artinya jika variabel lainnya bernilai tetap dan mengalami kenaikan 1%, maka variabel ketersediaan informasi keuangan daerah (Y1) akan mengalami kenaikan 0,039 dengan asumsi bahwa IPM (X2) dan *leverage* (X3) konstan.
- c. Koefisien regresi variabel IPM (X2) mengalami kenaikan sebesar 0,421 yang artinya jika mengalami kenaikan 1%, maka variabel ketersediaan informasi keuangan daerah (Y1) akan mengalami kenaikan 0,421 dengan asumsi bahwa kompetisi politik (X1) dan *leverage* (X3) bernilai konstan.
- d. Koefisien regresi variabel *leverage* (X3) mengalami penurunan sebesar 0,144 yang artinya jika mengalami kenaikan 1%, maka variabel

ketersediaan informasi keuangan daerah (Y1) akan mengalami penurunan 0,144 dengan asumsi bahwa kompetisi politik (X1) dan IPM (X2) bernilai konstan.

Tabel 4.15 Analisis Regresi Linear Berganda (Y2)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,012	3,084		4,867	0
	Kompetisi Politik (X1)	0,020	0,141	0,022	3,475	0,021
	IPM (X2)	0,473	0,188	0,418	2,517	0,015
	<i>Leverage</i> (X3)	-0,034	0,155	-0,032	-1,918	0,009

a. Dependent Variable: Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah (Y2)

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Dari tabel diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 15,012 dan nilai koefisien untuk variabel kompetisi politik adalah 0,020, IPM sebesar 0,473 dan *leverage* sebesar 0,034 maka persamaan regresi diperoleh sebagai berikut:

$$Y2 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

$$Y2 = 15,012 + 0,020 X1 + 0,473 X2 - 0,034 X3 + e$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh, mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Nilai konstan sebesar 15,012 bernilai positif yang artinya variabel kompetisi politik, IPM dan *leverage* bernilai 0 maka variabel keteraksesan informasi keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 15,012.
- b. Koefisien regresi variabel kompetisi politik (X1) mengalami kenaikan sebesar 0,020 yang artinya jika variabel lainnya bernilai tetap dan mengalami kenaikan 1%, maka variabel ketersediaan informasi keuangan

daerah (Y1) akan mengalami kenaikan 0,020 dengan asumsi bahwa IPM (X2) dan *leverage* (X3) konstan.

- c. Koefisien regresi variabel IPM (X2) mengalami kenaikan sebesar 0,473 yang artinya jika mengalami kenaikan 1%, maka variabel ketersediaan informasi keuangan daerah (Y1) akan mengalami kenaikan 0,473 dengan asumsi bahwa kompetisi politik (X1) dan *leverage* (X3) bernilai konstan.

Koefisien regresi variabel *leverage* (X3) mengalami penurunan sebesar 0,034 yang artinya jika mengalami kenaikan 1%, maka variabel ketersediaan informasi keuangan daerah (Y1) akan mengalami penurunan 0,034 dengan asumsi bahwa kompetisi politik (X1) dan IPM (X2) bernilai konstan.

4.3 Pembahasan dan Diskusi Hasil Penelitian

4.3.1 Kompetisi Politik (X1) Berpengaruh Terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (Y1)

Hipotesis pertama (H1a) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh kompetisi politik terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama (H1a) diterima. Menurut Nairobi & Jaya (2014) menjelaskan bahwa persaingan politik adalah persaingan memperebutkan kekuasaan untuk mengontrol pemerintah dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan politik dan sosial.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat persaingan politik akan mendorong pemerintah untuk lebih

transparan dan memberikan informasi keuangan daerah dalam upaya menyediakan atau tersediaanya informasi keuangan daerah dengan mudah. Kompetisi politik yang tinggi menimbulkan tuntutan mengenai transparansi informasi keuangan daerah juga akan semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena semakin banyak pihak yang memerlukan informasi tersebut untuk mengetahui keadaan pemerintahan terutama keadaan keuangan pemerintah daerah. Tuntutan dari berbagai pihak mengenai transparansi informasi keuangan daerah dapat dipenuhi dengan cara menyediakan informasi keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yang mana pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang mana sebagai *principal* bentuk strategi tersebut merupakan menyediakan informasi keuangan daerah secara terbuka dengan mudah agar masyarakat juga bisa melihat kinerja pemerintah daerah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Teori keagenan menyatakan bahwa informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah lebih banyak dibandingkan informasi yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah daerah cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan partai politik, sehingga memunculkan terjadinya asimetri informasi. Masyarakat sebagai pihak yang tidak terlibat langsung mengawasi kegiatan dalam pemerintahan menyebabkan kurangnya informasi yang dimiliki. Informasi keuangan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai media pengawasan oleh masyarakat dan pihak lain yang

berkepentingan. Penyediaan informasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah transparan terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nosihana dan Yahya (2016) yang menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Adapun penelitian Hanifah (2017) yang menunjukkan bahwa kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah

4.3.2 Kompetisi Politik (X1) Berpengaruh Terhadap Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah (Y2)

Hipotesis pertama (H1b) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh kompetisi politik terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama (H1b) diterima. Menurut Nairobi & Jaya (2014) menjelaskan bahwa persaingan politik adalah persaingan memperebutkan kekuasaan untuk mengontrol pemerintah dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan politik dan sosial. Afryansyah (2013) menyatakan bahwa perilaku oportunistik ini mungkin akan berkurang jika ada oposisi yang kuat untuk memantau kelompok yang ada di pemerintah. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat persaingan politik menjadikan pemerintah daerah harus lebih dapat memenuhi kepentingan semua pihak. Semakin banyak partai politik pendukung kepala daerah maka masyarakat dan pihak lain terutama pesaing kepala daerah pada pemilukada semakin menuntut

pemerintah daerah lebih transparan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban keuangan daerah dapat diwujudkan dengan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan menjelaskan bahwa kompetisi politik yang tinggi akan semakin banyak pihak yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Hal tersebut terjadi karena berbagai pihak ingin memiliki informasi yang sama dengan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Perbedaan informasi dapat diatasi dengan cara pemerintah daerah memberikan akses yang mudah untuk memperoleh informasi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nosihana dan Yahya (2016) yang menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah. Adapun penelitian Hanifah (2017) yang menunjukkan bahwa kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah

4.3.3 IPM (X2) Berpengaruh Terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (Y1)

Hipotesis kedua (H2a) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh IPM terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah, sehingga hipotesis kedua (H2a) diterima. Menurut (Setyowati, 2016) menjelaskan bahwa Tingkat pembangunan masyarakat menunjukkan tingkat kemajuan yang dicapai suatu masyarakat. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa Semakin tinggi pembangunan

masyarakat akan menimbulkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyediakan informasi keuangan yang lebih lengkap dan rinci. Semakin tinggi pembangunan masyarakat, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin baik sehingga keinginan masyarakat yang ingin terpenuhi akan semakin beragam. Beragamnya keinginan masyarakat akan menimbulkan tuntutan kepada pemerintah daerah agar masyarakat juga memiliki informasi yang lebih luas mengenai pengelolaan anggaran daerah.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan menjelaskan bahwa yang mana pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus memenuhi keinginan pihak *principal*. Pemenuhan tuntutan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara menyediakan informasi keuangan daerah yang lebih lengkap. Kualitas masyarakat yang baik akan menyadari perannya dalam pemerintahan daerah. Masyarakat akan mengetahui bahwa mereka berhak dan berperan dalam mengawasi kegiatan pemerintahan. Masyarakat dapat menilai kinerja dari pemerintah daerah melalui informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setyowati (2016) dan Hanifah (2017) yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah.

4.3.4 IPM (X2) Berpengaruh Terhadap Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah (Y2)

Hipotesis kedua (H2b) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh IPM terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah, sehingga hipotesis kedua (H2b) diterima. Menurut (Setyowati, 2016) menjelaskan bahwa Tingkat pembangunan masyarakat menunjukkan tingkat kemajuan yang dicapai suatu masyarakat. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keberadaan masyarakat yang tingkat pembangunannya baik pula. Tingkat pembangunan masyarakat yang baik dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia pada masing-masing daerah. Pembangunan masyarakat yang baik akan melahirkan masyarakat dengan kualitas yang baik. Kualitas masyarakat yang tinggi akan meningkatkan rasa ingin berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan yaitu dengan cara berperan dalam mengawasi jalannya kegiatan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap keuangan daerah oleh masyarakat dilakukan melalui informasi keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan dalam melandasi pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah yaitu indeks pembangunan manusia yang semakin tinggi mengandung arti bahwa kualitas sumber daya manusianya semakin baik. Perbedaan informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat akan berkurang dengan cara pemerintah memberikan informasi yang dimilikinya kepada masyarakat. Pemerintah daerah

juga tidak hanya menyediakan informasinya, tetapi juga memperhatikan kemudahan dalam mengakses informasi tersebut.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setyowati (2016) dan Hanifah (2017) yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah.

4.3.5 *Leverage* (X3) Berpengaruh Terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (Y1)

Hipotesis ketiga (H3a) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh *leverage* terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga (H3a) diterima. Styles & Tennyson (2007) berpendapat bahwa pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini akan memberikan dampak pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan program terpadu bagi masyarakat dimasa mendatang. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi bagian yang sensitif bagi pemerintah daerah. Semakin tinggi jumlah hutang maka dapat diketahui bahwa penerimaan pemerintah daerah belum mampu untuk menutupi biaya kegiatan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki nilai *leverage* tinggi, cenderung enggan untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau kreditur. Hal tersebut dilakukan karena kinerja pemerintah dianggap kurang baik karena tingginya nilai *leverage* yang dimiliki. Pemerintah

lebih memilih untuk menyimpan informasi tersebut agar masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan tidak mengetahui masalah yang ada pada pemerintahan. Penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi nilai leverage pemerintah daerah, maka semakin rendah pemerintah daerah dalam menyediakan informasi keuangan daerah. Pemerintah daerah yang memiliki nilai *leverage* rendah lebih cenderung menyediakan informasi keuangan daerah agar kinerja pemerintah daerah terlihat baik.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yang meyakini bahwa besarnya utang menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menyediakan informasi keuangan daerah. Menurut teori keagenan, pemerintah memiliki lebih banyak informasi, termasuk informasi tentang jumlah utang pemerintah daerah. Pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan informasi tentang utangnya karena tidak ingin kinerjanya dinilai buruk.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hanifah (2017) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Adapun penelitian yang dilakukan (Putra & Syofyan, 2020) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah.

4.3.6 *Leverage* (X3) Berpengaruh Terhadap Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah (Y2)

Hipotesis ketiga (H3b) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh *leverage* terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga (H3b) diterima. Styles & Tennyson (2007) berpendapat bahwa pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini akan memberikan dampak pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan program terpadu bagi masyarakat dimasa mendatang. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa Tingkat leverage yang tinggi akan membuat pemerintah daerah enggan memberikan informasi kepada masyarakat, kreditur, maupun pihak lain yang berkepentingan. Jika publik mengetahui bahwa tingkat leverage pemerintah daerah tinggi, mereka akan menilai kinerja pemerintah daerah rendah. Masyarakat menganggap kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan pemerintah lemah. Hal ini terjadi karena pendapatan pemerintah daerah tidak dapat mendanai operasional pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan dimana Pemerintah dalam hubungan keagenan sebagai agen mendapat mandat dari masyarakat sebagai prinsipal untuk menjalankan tugas pemerintahan yaitu memberikan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat mempercayai pemerintah untuk menggunakan dan mengelola sumber daya yang ada dan harus bertanggung jawab kepada masyarakat di masa yang akan datang. Hubungan teori keagenan menimbulkan masalah berupa asimetri informasi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi jalan bagi pemerintah untuk mengatasi masalah asimetri informasi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hanifah (2017) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap keteraksesan

informasi keuangan daerah. Adapun penelitian yang dilakukan (Putra & Syofyan, 2020) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kompetisi politik, indeks pembangunan manusia dan leverage terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan pemerintah daerah se-Luwu Raya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan pemerintah daerah se-Luwu Raya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetisi politik akan menimbulkan tuntutan mengenai transparansi informasi keuangan daerah juga akan semakin meningkat.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan pemerintah daerah se-Luwu Raya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembangunan masyarakat akan menimbulkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyediakan informasi keuangan yang lebih lengkap dan rinci.
3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan pemerintah daerah se-Luwu Raya. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi nilai *leverage* yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka pemerintah cenderung tidak memberikan kemudahan informasi keuangan daerah begitu pula sebaliknya semakin rendah nilai *leverage* yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka pemerintah akan memberikan kemudahan terhadap informasi keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas maka penulis memberikan saran antaran lain:

1. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang memiliki topik dan tema yang sama.
2. Selain menggunakan kuesioner tertulis, juga dapat menambahkannya melalui wawancara. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan jangkauan narasumber yang lebih luas sehingga penelitian tersebut dapat digunakan secara universal. Dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian sehingga dapat diketahui adanya variabel lain yang mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, K., & Efendi, Y. N. (2018). *Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat dan Stabilitas Politik Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Yudha*. 1–31.
- Afryansyah, R. D. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah*.
- Diani, R. P. (2016). *Analisi Determinan Pelaporan Keuangan Di Internet Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia*.
- Gatara, A. S. (2008). *Ilmu Politik*. Pustaka Setia.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2, 16.
- Hanifah, F. F. (2017). *Pengaruh Kompetisi Politik, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Leverage Terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kurniawan, C. H., Atma, Novi, L., & Scorpianti, K. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia*. 31(2), 184–206.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). *Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities*. 24, 101–121. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Medina, F. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia*.
- Minarsih, R. A. (2015). *Pengaruh size, wealth, leverage dan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di jawa tengah*.
- Nairobi, & Jaya, W. K. (2014). *Kompetisi Politik Lokal Di Indonesia: Studi Dalam Perspektif Ekonomi*.

- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). *Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia*. 3(2), 87–101.
- Putra, A. A. A., & Syofyan, E. (2020). *Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita Dan Leverage Terhadap Keteraksesan Internet Financial Report Oleh Pemerintah Daerah*. 2(1), 2020–2034.
- Rahman, A., Sutaryo, & Budiarmanto, A. (2013). Determinan Internet Financial Local Reporting Di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 4(2), 946. <https://doi.org/10.17509/jaset.v4i2.10095>
- Rahmawati, R. A., & Mahmud, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5, 9.
- Ratmono, D. (2013). *Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Internet: Pengujian Teori Institusional Dan Keagenan*.
- Saputra, W. A. (2011). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pdrb, Ipm, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah*.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Setyowati, L. (2016). Determinan Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(April), 45–62. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3120>
- Sinaga, Y. F. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah*.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The Accessibility Of Financial Reporting Of U.S. Municipalities On The Internet. *J. Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. : Alfabeta. *Hilos Tensados*.
- Suhartono, S., & Jessica, N. (2020). *Pengaruh Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris : Pemerintah Daerah Di Pulau Sumatera Tahun 2018*. 9(021), 14–27.

- Todara, P. M. (2003). *Ekonomi Pembangunan Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Wau, I. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah*.
- Widarwanto, A., Erlina, & Yahya, I. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Terhadap Ipm Dengan Belanja Pelayanan Dasar (BPD) Sebagai Moderating. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 7(2).
- Zaman, R. K. (2016). *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. PT. Mizan Publika.
- Zimmerman, D. H., & Wieder, D. L. (1977). *The Diary: Diary-Interview Method*. August 1972, 479–498.